



**PENENTUAN KOMPONEN PRIORITAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 1995/1996-1999/2000**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh

Yuli Trisiswoyo
NIM : 970810101267

Asal:	Halaman Pemberian	Klass
Terima Tgl : 25 FEB 2002		2202
No. Induk : 0349		TRi
KLASIR / PENYALIN :		P

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2001**

JUDUL SKRIPSI

PENENTUAN KOMPONEN PRIORITAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1995/1996 - 1999/2000

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : YULI TRISISWOYO

N. I. M. : 970810101267

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

24 NOPEMBER 2001

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

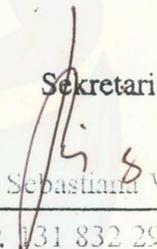
Ketua,



Prof. Drs. H. Kadiman, SU

NIP. 130 261 684

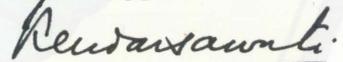
Sekretaris,



Dra. Sebastiana V.M.Kes

NIP. 131 832 296

Anggota,



Dra. Ken Darsawarti, MM

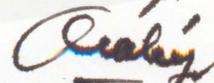
NIP. 130 531 975

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,



Drs. H. Liakip, SU

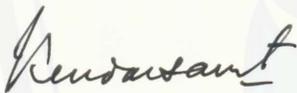
NIP. 130 531 976



TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penentuan Komponen Prioritas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000
Nama Mahasiswa : YULI TRISISWOYO
N I M : 9708101267
Jurusan : IESP
Kosentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Pembimbing I



Dra. Ken Darsawarti, MM
NIP130.531.975

Pembimbing II



Drs. Sonny Sumarsono, MM
NIP 137.759.863

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM
NIP 130.676.291

Kupersembahkan karya kecil dan sederhanaku ini kepada :

- Yang tercinta, tersayang dan yang kuhormati kedua orang tuaku yang dengan tulus ikhlas selalu berdoa dan memberikan dorongan semangat;
 - Yang kubanggakan padhe dan budheku yang selalu memberikan motivasi;
 - Yang kucintai kedua kakakku dan adikku
- Almamater kebanggaanku tempatku menjadi besar dan benar

Motto

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat , ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk , baginya pintu dibukakan”

(Matius 7 :7 – 8)

**“Bersukacitaah dalam pengharapan ,
sabarlah dalam kesesakan ,
dan bertekunlah dalam doa”**

(Roma 12 :12)

“Pengalaman adalah guru yang terbaik”

(pepatah)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih hikmat penulis utarakan disini selain memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH atas kasih karunia dan penyertaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penentuan Komponen Prioritas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 - 1999/2000”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan syarat – syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini masih sangat sederhana, karena itu penulis sangat mengharap adanya respon dengan mengadakan penelitian yang sejenis dengan menggunakan alat uji yang lebih baik sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik pula. Selain itu besar harapan penulis untuk dapat diterima sebagai tanda terima kasih kepada Almamater yang nantinya dapat dipakai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang memerlukannya.

Penulis menyadari, bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini bukan semata-mata hasil jerih payah pemikiran sendiri, peran serta dan bantuan semua pihak sangat memberikan arti tersendiri bagi terselesaikannya penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya khususnya kepada Ibu Dra. Ken Darsawarti,MM dan Bapak Sonny Sumarsono,MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikiran guna mengarahkan penulisan ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staf dan segenap bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi atas bekal ilmu pengetahuan yang disampaikan;
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri beserta staf yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan;

3. Bapak Kepala Kantor Statistik Kabupaten Kediri beserta staf yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan;
4. Bapak kepala Bappeda Kabupaten Kediri beserta staf yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan;
5. Keluarga bapak Kasedyan yang telah banyak membantu dan telah memberikan kenangan baik suka maupun duka selama di Jember;
6. Keempat ayamku, Basir, Klontong, Reto dan ungluk yang selalu setia menghiburkanku dalam kejenuhan;
7. Teman – temanku seperjuangan di GMKI dan UKMK – SUK ,PMK ,LPMI;
8. Teman – teman curhatku emon, dika, edo, yang setia mendengarkan cerita – ceritaku;
9. Temanku seperjuangan SP'97 GL;
10. Buat teman – temanku di Belitung 101 yang tidak dapat kusebut satu – satu namanya,yang telah banyak memberikan motivasi.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan yang sebesar – besarnya dari Tuhan Yang Maha Esa.
Amin

Jember, Nopember 2001

Penulis

DAFTAR ISI

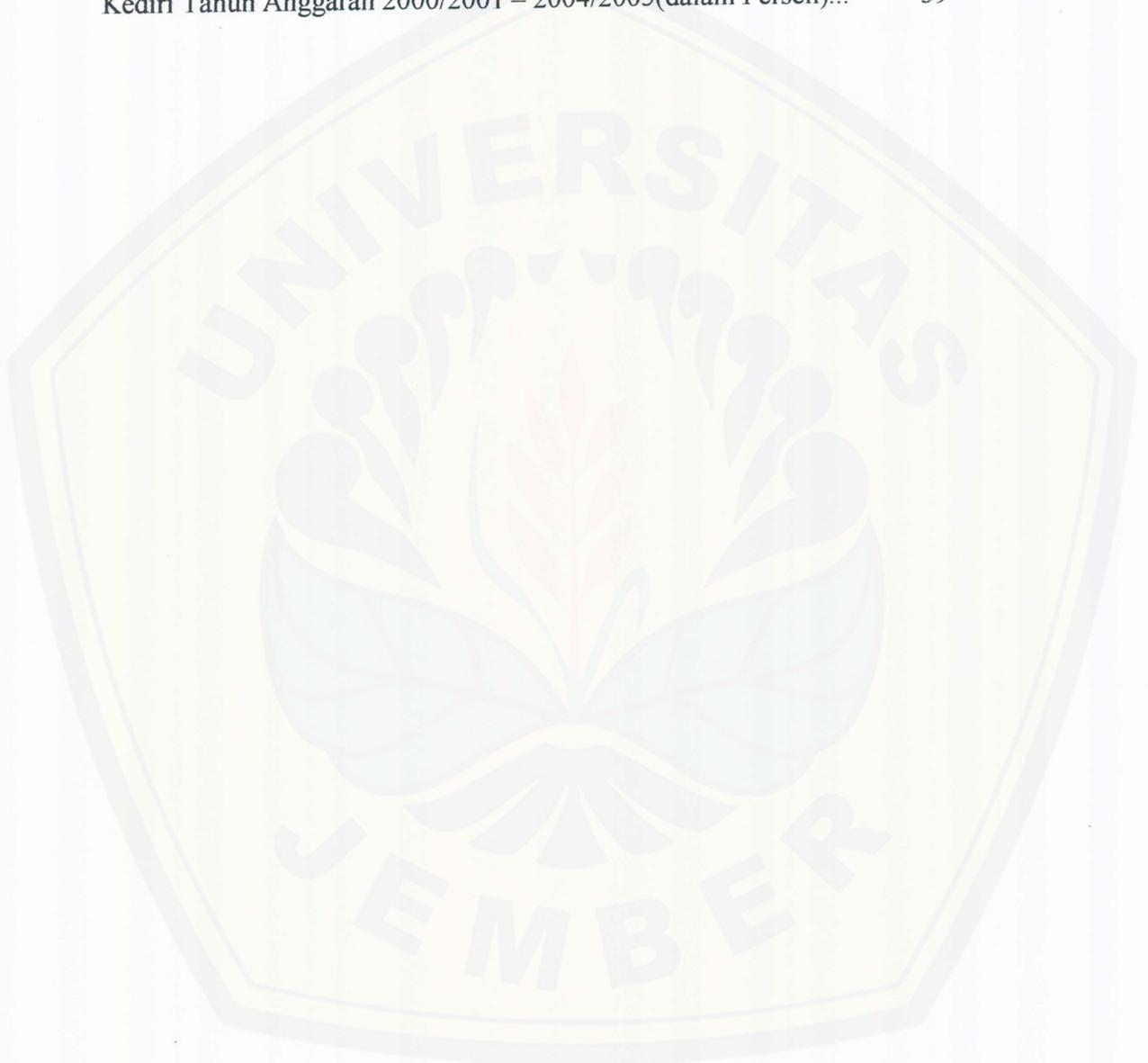
	Halaman
HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan penelitian sebelumnya.....	6
2.2 Landasan Teori.....	6
2.2.1 Otonomi Daerah.....	8
2.2.2 Hubungan antara Keuangan Pusat dan Daerah.....	11
2.2.3 Sumber – Sumber Pendapatan Daerah.....	13
2.2.3.1 Pajak Daerah.....	17
2.2.3.2 Retribusi Daerah.....	19
2.2.3.3 Perusahaan daerah.....	19
2.2.3.4 Dinas Daerah dan Pendapatan Lainnya.....	20
2.2.3.5 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.....	21
2.2.3.6 Dana Perimbangan.....	22
2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	23
2.2.5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi.....	25
2.2.6 Tingkat Kemandirian Daerah.....	27
2.2.7 Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	28
2.2.7.1 Pengeluaran rutin Daerah.....	29
2.3 Hipotesis.....	30

BAB III. METODELOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Rancangan penelitian.....	32
3.1.1 Jenis Penelitian.....	32
3.1.2 Unit Analisis.....	32
3.2 Prosedur Pengambilan Data.....	32
3.3 Metode Analisis.....	33
3.4 Definisi variabel operasional.....	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Keadaan Perekonomian.....	37
4.2 Kondisi Keuangan Daerah.....	38
4.2.1 Pajak daerah.....	41
4.2.2 Retribusi Daerah.....	42
4.2.3 Laba BUMD.....	44
4.2.4 Penerimaan Dinas – Dinas.....	45
4.2.5 Penerimaan Lain – Lain.....	46
4.2.6 Penerimaan Bagi Pajak dan Bukan Pajak.....	47
4.2.7 Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	48
4.3 Penentuan Komponen Prioritas Pendapatan Daerah.....	50
4.4 Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Komponen Prioritas Pendapatan Daerah.....	53
4.5 Estimasi pendapatan Daerah Dalam Mewujudkan Kemandirian Daerah	55
4.6 Pembahasan.....	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	66
Daftar Pustaka.....	68
Lampiran - Lampiran	70

Daftar Tabel

Tabel :	halaman
1 Penerimaan Daerah Berdasarkan Jenis Penerimaan dan Prosentase Pembaginya.....	23
2 Perbandingan Perkembangan Pengeluaran Rutin dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 (dalam persen).....	33
3 Perkembangan PDRB Kabupaten Kediri Selama Tahun 1995-2000 Menurut Harga Konstan (dalam Jutaan).....	37
4 Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kediri Tahun 1995- 200(dalam Ribuan).....	38
5 Besarnya Sumbangan Pos –Pos Penerimaan Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996–199/2000(dalam Persen).....	40
6 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000(dalam Persen)..	42
7 Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000(dalam Persen)..	43
8 Perkembangan Penerimaan Laba BUMD Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000(dalam Persen)..	44
9 Perkembangan Penerimaan Dinas – Dinas Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000(dalam Persen).....	45
10 Perkembangan Penerimaan Lain –Lain Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000(dalam Persen).....	47
11 Perkembangan Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000(dalam Persen).....	48
12 Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 (dalam Ribuan).....	49
13 Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Komponen Prioritas Pendapatan Daerah Kabupaten di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996–1999/2000(dalam Persen).....	54
14 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	56
15 Perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004/2005	57
16 Perkembangan Pengeluaran Rutin Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000(dalam Persen).....	57

17	Perkiraan Pengeluaran rutin Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004/2005	58
18	Angka Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000(dalam Persen)..	58
19	Perkiraan Angka Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004/2005(dalam Persen)...	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	halaman
1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000(dalam ribuan).....	70
2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000 (dalam ribuan).....	71
3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000 (dalam ribuan).....	72
4 Realisasi Penerimaan Laba BUMD Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000 (dalam ribuan).....	73
5 Realisasi Penerimaan Lain – Lian Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000 (dalam ribuan)...	74
6 Realisasi Penerimaan Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000 (dalam ribuan).....	75
7 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 (dalam ribuan).....	76
8 Hasil Perhitungan Indek Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 – 2004/2005(dalam persen).....	77
9 Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000.....	78
10 Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Komponen Pajak Daerah di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	79
11 Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Komponen Retribusi Daerah di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	80
12 Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Komponen Laba BUMD di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	81
13 Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Komponen Penerimaan Lain – Lain di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000.....	82

14	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Komponen Penerimaan Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	83
15	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	84
16	Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 -1999/2000 ..	85
17	Hasil Perhitungan Skalling Total Retribusi Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 -1999/2000 ..	86
18	Hasil Perhitungan Skalling Total Laba BUMD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 -1999/2000	87
19	Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Lain – Lain Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 -1999/2000 ..	88
20	Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Lain – Lain Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 -1999/2000 ..	89
21	Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 -1999/2000	90
22	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Pajak Penerangan Umum di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	91
23	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Pajak Reklame di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	92
24	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Pajak Kendaraan Tidak Bermotor di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	93
25	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun pajak Pembayaran Iuran Air Bawah Tanah di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	94
26	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Pajak Pembangunan I di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	95
27	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Retribusi Pasar di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	96
28	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Retribusi Kebersihan di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	97
29	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Retribusi KTP/KK/ Catatan Sipil di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000.....	98

30	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Retribusi Ijin bangunan Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000.....	99
31	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Balai Pengobatan Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996–1999/2000.....	100
32	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Dinas RSUD Pare di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	101
33	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Dinas Peternakan Daerah di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	102
34	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Laba Bank Pasar di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	103
35	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Laba Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	104
36	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Hasil Penjualan Rupa – Rupa di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000	105
37	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Jasa Giro Dari Bank Pembangunan daerah di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000.....	106
38	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun PBB di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000.....	107
39	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Per Tahun Pembagian Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000.....	108
40	Data Penerimaan Dan Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 Dalam Data Kuartalan	109
41	Hasil analisis regresi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri	110
42	Hasil analisis regresi Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Kediri	111
43	Hasil Perhitungan Ternd Pendapatan daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004/2004.....	112
44	Hasil Perhitungan Ternd Pengeluaran Rutin Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004/2004.....	113

undangan yang berlaku. Makna otonomi daerah dalam hal ini ditempatkan dalam kerangka memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengkoordinasikan memadukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan berbagai program pembangunan di daerah.

Menurut Ramses (2000:51) secara empiris otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang telah diterapkan selama dua puluh lima tahun itu ternyata tidak memenuhi harapan, hal ini tampak dalam dua hal. Pertama, aspek wewenang dalam praktek kewenangan atas urusan yang diserahkan menjadi urusan daerah masih tetap berada pada pemerintah pusat. Kecenderungan yang kuat adalah sentralistik yang menempatkan pemerintah daerah sebagai agen (*agency model*). Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang luas dalam penetapan kebijakan dan pengaturan secara seragam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, otonomi yang nyata dan bertanggung jawab menekankan segi kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu variabel penting dalam menilai kemampuan berotonomi. Ketergantungan daerah yang sangat kuat pada sumber – sumber penerimaan dari pemerintah pusat dan kecilnya kontribusi PAD dalam struktur keuangan daerah menandai hubungan keuangan pusat dan daerah. Kondisi kemampuan pembiayaan yang sangat lemah itu menyebabkan ketidakberdayaan daerah dalam membangun daerahnya.

Pembentukan undang – undang yang baru, yaitu UU. No. 22/1999 dan UU. No. 25/1999 diharapkan dapat memberikan keadilan ekonomi pusat dan daerah. Menurut UU. No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan pada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam wujud otonomi yang luas, nyata bertanggung jawab dan titik penerapannya pada daerah Kabupaten dan Kotamadya. Semua kewenangan bidang – bidang pemerintahan akan diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali pada bidang pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, luar negeri, dan agama serta bidang yang lain yang akan ditentukan

kepada pemerintah daerah kecuali pada bidang pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, luar negeri, dan agama serta bidang yang lain yang akan ditentukan melalui peraturan pemerintah. Penyerahan kewenangan pemerintah tersebut harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaannya, oleh karenanya pemerintah harus memiliki sumber-sumber sendiri untuk membiayai pengeluarannya.

Faktor utama yang menentukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan dari pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan yang terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam pemerintahan negara (Koswara,2000:21). Semakin besar pengeluaran rutin yang dapat dibiayai oleh pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah maka angka indek kemampuan rutin suatu daerah semakin tinggi, sehingga tingkat kemandirian suatu daerah semakin besar. Kemandirian daerah dalam hal ini adalah tingkat kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran yang paling minimal yaitu pengeluaran rutin daerah (Esmara, 1986: 26).

Hal yang perlu dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kediri adalah meningkatkan pendaptan daerah dari komponen pendapatan daerah aslinya agar dapat membiayai pengeluaran rutinnya, sehingga daerah tidak terlalu menggantungkan pada bantuan pusat. Pendapatan daerah harus selalu meningkat dan harus digunakan seefisien mungkin. Realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 sebagai berikut : pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 13.754.736.850,00 meningkat menjadi Rp. 19.465.226.570,00 pada tahun anggaran 1996/1997 atau meningkat sebesar 41,52%, dan menurun menjadi sebesar Rp.18.885.520460,00 pada tahun anggaran 1997/1998 atau menurun 2,98%. Pada

tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp.18.885.520460,00 meningkat menjadi Rp. 22.898.032.480,00 pada tahun anggaran 1998/1999 atau meningkat menjadi sebesar 21,25 % dan pada tahun anggaran 1999/2000 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 24.182.058.280,00 atau meningkat sebesar 5,61%.

Pada sisi pengeluaran rutin juga terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp.13.337.788.000,00 pada tahun anggaran 1995/1996 menjadi sebesar Rp.16.283.813,000,00 pada tahun anggaran 1996/1997 atau naik sebesar 22,09 % dan kemudian naik lagi menjadi sebesar Rp.20.216.442.000,00 pada tahun anggaran 1997/1998 atau naik sebesar 24,15%. Pada tahun anggaran 1998/1999 menjadi sebesar Rp.75.690.047.000,00 atau naik sebesar 274,39% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun anggaran 1999/2000 meningkat menjadi sebesar Rp. 133.097.021.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 49,42% dari tahun anggaran sebelumnya.

Kondisi keuangan yang terjadi di Kabupaten Kediri seperti tersebut diatas, akan berdampak pada kesanggupan Kabupaten Kediri dalam menjalani era otonomi daerah secara finansial. Kondisi keuangan yang demikian akan menyebabkan penurunan pada Indeks Kemampuan Rutin Daerah, yang merupakan salah satu indikator suatu daerah untuk mampu berotonomi. Pemerintah Kabupaten Kediri harus berupaya terus – menerus meningkatkan pendapatan daerah yang dimilikinya agar mampu *survive* dalam menjalani era otonomi daerah. Penentuan Komponen prioritas pendapatan daerah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

1.2 Perumusan Masalah

Mengingat pentingnya faktor kemampuan keuangan daerah dalam menjalani era otonomi daerah, maka Penentuan komponen prioritas pendapatan daerah menjadi sangat penting maknanya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah:

1. komponen prioritas mana, dalam pendapatan daerah yang memungkinkan untuk dikembangkan dan memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan

pendapatan daerah Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 sampai tahun 1999/2000;

2. seberapa besar tingkat pertumbuhan rata - rata komponen prioritas pendapatan daerah Kabupaten Kediri setiap tahun;
3. bagaimana estimasi pendapatan daerah Kabupaten Kediri mulai tahun anggaran 2000/2001 sampai dengan tahun 2004/2005 serta kemampuannya dalam mewujudkan kemandirian daerah..

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui :

- 1 komponen prioritas pendapatan daerah yang memiliki keunggulan yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000;
- 2 pertumbuhan rata - rata komponen prioritas pendapatan daerah Kabupaten Kediri;
- 3 estimasi pendapatan daerah mulai tahun anggaran 2000/2001 sampai dengan tahun 2004/2005 di Kabupaten Kediri serta kemampuannya dalam mewujudkan kemandirian daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kediri, yang ada kaitannya dengan pengembangan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
2. menjadi bahan referensi dan kajian bagi upaya penelitian yang lebih **komprehensif terhadap masalah yang sama.**



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Charis (1995), dengan Judul “Pemilihan Prioritas Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Sumbangan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik tahun 1990/1991 sampai 1994/1995”. Disimpulkan bahwa berdasarkan *Skalling* terpilih 5 komponen PAD prioritas di Kabupaten Gresik yang memiliki keunggulan dibandingkan komponen PAD yang lainnya, yang mungkin untuk dikembangkan antara lain : (1) pajak pendaftaran perusahaan; (2) pajak pertunjukan dan keramaian , (3) pajak reklame; (4) pajak pembangunan I , (5) pajak potong hewan, sedangkan untuk retribusi terdiri dari: (1) retribusi penerangan jalan umum; (2) uang sepadan /ijin bangunan ; (3) retribusi rumah sakit, balai pengobatan/pukesmas; (4) uang dispensasi jalan atau jembatan; (5) retribusi pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Suwitaningsih(1993), dengan judul “Potensi dan Pengembangan Keuangan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi “. Disimpulkan bahwa berdasarkan analisis proporsi, komponen PAD yang mempunyai peranan yang paling besar terhadap PAD selama pelita II sampai pelita IV adalah sebagai berikut (1) retribusi daerah sebesar 55,8% – 82,9%; (2) pajak daerah sebesar 10,9% - 40,4%; (3) laba perusahaan daerah sebesar 1,6% - 9,9 %; (4) penerimaan lain-lain sebesar 1,1%-7,8%

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Menurut UU.No.22 tahun 1999, otonomi daerah adalah merupakan suatu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pelaksanaannya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan potensi dan keanekaragaman daerah serta kemandirian daerah (Setiawan dalam Prosiding, 1999:62).

Berdasarkan UU No.22 tahun 1999 wilayah Negara Kesatuan RI dibagi dalam daerah propinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Berdasarkan undang – undang tersebut, pemberian kewenangan otonomi daerah di indonesia kepada daerah kota dan kabupaten berdasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan penyelenggaraan pemerintah yang mencakup semua bidang pemerintahan (yang wajib ada 11 bidang pasal 11 ayat 2), kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan sebagai konsekuensi hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam pencapaian tujuan pemberian otonomi.

Menurut Simanjutak (dalam prosiding, 1999) pengertian otonomi tidaklah bersifat absolut dalam arti mengandung unsur kebebasan atau kemerdekaan yang sepenuhnya karena ada batasan – batasan bergerak dari otonomi sendiri dan bergantung kepada situasi nasional dan juga nilai – nilai budaya terhadap kekuasaan dan wewenang di negara yang bersangkutan, untuk itu paling tidak ada 4 hal yang penting diperhatikan :

1. adanya lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah yang bersangkutan;
2. adanya kebebasan atau keleluasaan dalam menentukan pelayanan jasa masyarakat beserta biaya pengeluaran dengan catatan tidak berbenturan dengan ketentuan di atasnya;
3. adanya kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri dari proses mulai penunjukan, pengangkatan, pemecatan, membuat persyaratan atau aturan bagi pegawainya sehingga daerah akan memiliki pegawai yang berkualitas dan loyalitas;
4. adanya sumber - sumber pendapatan yang dikuasai oleh daerah, daerah memiliki sumber - sumber pendapatan sendiri. Hal ini bukan berarti sebagian besar atas keseluruhan pengeluaran daerah mesti dibiayai oleh sumber- sumber daerah tersebut, yang terpenting disini adalah adanya keleluasan tertentu bagi daerah untuk ikut menentukan atau memilih sampai tahap tertentu beberapa aspek pelayanan masyarakat diwilayahnya, walaupun daerah hanya membiayai misalnya 20% dari total anggaran yang berlaku.

Otonomi daerah bukan hanya diartikan sebagai proses akumulasi politik berupa pelimpahan wewenang pembangunan dan pemerintahan, tetapi juga berkaitan tersedianya sumber – sumber keuangan yang ada pada berbagai tingkatan daerah (Anwar dan Basri(Ed) :1990:165). Salah satu pilar utama yang harus ditegakkan oleh pemerintah pusat dalam mengembangkan otonomi daerah adalah aspek pembiayaan (Basri,1995:112)

2.2.2 Hubungan Keuangan antara Pusat Dan Daerah

Hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat menyangkut masalah tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu antara tingkatan - tingkatan pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Hak

mengambil keputusan mengenai anggaran pemerintah, bagaimana memperoleh, dan membelanjakannya merupakan unsur yang penting untuk menjalankan kekuasaan .

Masalah keuangan daerah berkisar pada usaha peningkatan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat daerah, karena daerah merupakan sub nasional, maka kebijakan keuangan daerah tidak bisa lepas dengan kebijakan pusat. Menurut Davey (1988:254-269) Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada pendekatan kapitalis, pendekatan sumber pendapatan, pendapatan belanja, dan dapat pula berdasarkan pendekatan komprehensif. Pendekatan tersenut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Kapitalis, yaitu hubungan antara pusat dan daerah dalam segi keuangan atas dasar “Kuasa Komersial “. Pemerintah pusat mengadakan investasi modal ke daerah dengan harapan pemerintah daerah dapat mampu mengelola investasi yang diberikan, sehingga memberikan keuntungan bagi penanaman modal atau investasi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
- b. Pendekatan sumber pendapatan (*Income Source Approach*), yaitu pemerintah pusat memberikan sumber-sumber pendapatan pada daerah. Pemberian ini berupa wewenang untuk menikmati sebagian pungutan yang dilakukan atas nama pusat;
- c. Pendekatan belanja (*Expenditure Approach*), yaitu pendekatan yang mendasarkan diri pada pengeluaran – pengeluaran bagi pemerintah;
- d. Pendekatan Komprehensif (*Comprehensive Approach*), yaitu pemberian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan sendiri untuk membiayai pengeluaran daerah dan mencoba mempertemukan sumber – sumber pendapatan dan target belanja. Sumber pendapatan yang dikelola daerah sendiri merupakan pendapatan asli daerah. Bila pendapatan asli yang ada masih kurang untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran daerah maka kekurangannya mendapat bantuan dari pusat. Pendekatan komprehensif ini juga sering disebut dengan pendekatan defisit

Tujuan hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat menurut Davey adalah (ibnu Syamsy,1986:87) :

1. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkatan – tingkatan pemerintah mengenai peningkatan sumber – sumber pendapatan dan penggunaannya;
2. Pemerintah daerah mendapat bagian yang cukup dari sumber - sumber dana sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik;
3. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan yang lain;
4. Pemerintah daerah dalam mengusahakan pendapatan sesuai dengan pembagian yang adil terjadi keseluruhan beban pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas , maka untuk menutup keutuhan pembangunan di daerah, hubungan keuangan antara pemerintah daerah dengan pusat dapat melalui beberapa pendekatan. Semua pendekatan tersebut menekankan lebih dulu akan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan didaerahnya. Apabila sumber pembiayaan yang ada tidak mencukupi, maka pemerintah pusat baru ikut mengatasinya. Dalam praktek, pembiayaan pembangunan dengan “kekuatan daerah sendiri “tidak selalu berarti yang membiayai hanya pemerintah daerah saja. Pembangunan daerah tidak semata – mata menjadi tanggung jawab masyarakat daerah atau monopoli pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pemerintah daerah bersama – sama masyarakat daerah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pembangunan masyarakat didaerahnya. Wujud dari tanggung jawab rakyat dalam pencapaian tujuan pembangunan antara lain adalah dalam bentuk dana swadaya masyarakat. Dana swadaya masyarakat tersebut dapat berupa dana swadaya murni dan dapat pula berupa dana swadaya imbalan, artinya suatu proyek misalnya sebagian dibiayai dengan dana swadaya masyarakat dan sebagian dibiayai dari dana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi apabila tujuan dan target pembangunan belum dapat dipenuhi hanya dengan sumber dana pemerintah daerah dan swadaya masyarakat,

maka pemerintah pusat memberikan sumber keuangan berdasarkan pendekatan tersebut diatas.

Basri (1995:112) menyebutkan bahwa salah satu pilar utama yang harus ditegakkan dalam mengembangkan otonomi daerah adalah aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian otonomi antara tugas dan tanggung jawab dengan aspek pendanaannya maka esensi dari otonomi daerah menjadi kabur, namun dalam membahas profil hubungan keuangan pusat dan daerah serta upaya untuk memperkuat sumber – sumber penerimaan daerah sudah tentu tidak lepas dari sistem dan mekanisasi pengelolaan keuangan negara.

2.2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, memerlukan sumber pembiayaan dalam bentuk uang yang tidak sedikit jumlahnya, untuk menutup pengeluaran dalam memenuhi kebutuhannya. Pemerintah daerah dalam hal ini harus dapat menggali sumber-sumber PAD sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Tjokroamidjojo(1991 :16) sumber – sumber penerimaan daerah meliputi:

1. pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan masih ada potensi didaerah;
2. penerimaan dan jasa - jasa pelayanan di daerah seperti retribusi atau tarif perijinan tertentu;
3. pendapatan – pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan – perusahaan daerah yaitu perusahaan – perusahaan yang mendapatkan sebagian modal atau seluruhnya dari kekayaan daerah;
4. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan tertentu dari pajak – pajak yang dipungut pemerintah pusat dan kemudian diserahkan kepada daerah;

5. pemberian subsidi secara langsung, yang penggunaannya ditentukan (*earmarked*) kepada daerah;
6. pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan tertentu atau disebut ganjaran;
7. pinjaman – pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Sumber - sumber penerimaan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tingkat I terdiri dari lima komponen besar yaitu: Pendapatan asli daerah (PAD), bagian hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dari pemerintah pusat, pinjaman daerah dan sisa lebih tahun yang lalu. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan laba BUMD, penerimaan dari dinas, dan penerimaan lain-lain. Pendapatan asli daerah inilah yang seharusnya menjadi tolok ukur dari kemampuan masing - masing daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu jumlah dan yang benar - benar menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah (Nazara,1997:20-21).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang benar - benar diperoleh dan dipergunakan oleh daerah untuk membiayai otonomi daerah, maka bisa dikatakan daerah itu semakin mandiri. Kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam wujud kemajuan pembangunan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh pada peningkatan komponen - komponen pendapatan asli daerah.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 PAD terdiri atas :

1. pendapatan asli daerah yaitu penghasilan pokok daerah yang bersumber pada :
 - a.Pajak daerah;
 - b.Retribusi daerah;
 - c.Bagian laba perusahaan daerah;
 - d.Lain -lain pendapatan yang sah;
2. dana perimbangan;
3. pinjaman daerah;

4. lain-lain pendapatan yang sah

Dana yang berasal dari keempat sumber tersebut saling menunjang satu sama lain untuk mewujudkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan membangun proyek - proyek tertentu di daerah.

2.2.3.1 Pajak Daerah

Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa pembalasan jasa secara langsung dapat ditunjuk (Suparmoko,1999:94). Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan - pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan publik. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum digunakan atau diusahakan oleh negara (Soetrisno,1991:202).

Berdasarkan definisi pajak diatas, maka pengertian pajak mencakup :

1. pungutan yang dilakukan oleh pemerintah;
2. ditentukan oleh undang-undang;
3. bagi pembayar pajak tidak diberikan balas jasa secara langsung;
4. dapat dipaksakan bagi siwajib pajak;
5. dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak bagi pemerintah daerah tingkat II mempunyai fungsi budgetir, dalam arti pajak daerah digunakan sebagai sumber penerimaan utama daerah, dalam membiayai kegiatan - kegiatan pemerintah, terutama kegiatan - kegiatan rutin. Jika pemerintah daerah tingkat II melalui pengenaan pajak sebagai pengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan secara stabilisasi ekonomi disebut pajak sebagai regulatory (Musgrave,1993:6)

Prinsip pengenaan pajak daerah tidak berbeda dengan prinsip - prinsip pengenaan pajak lainnya. Pengenaan pajak yang baik harus berlandaskan pada (Suparmoko,1999:97-98):

1. Prinsip kesamaan /keadilan (*equity*)

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam distribusi beban pajak itu

2 Prinsip kepastian (*certainty*)

Pajak hendaknya tegas jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh siwajib pajak dan memudahkan administrasi pemerintah.

3 Prinsip kecocokan /kelayakan (*Convenience*)

Pajak hendaknya jangan terlalu menekan siwajib pajak, sehingga wajib pajak akan senang hati dalam melakukan pembayaran pajak pada pemerintah.

4 Prinsip ekonomi(*Economy*)

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian minimum dalam arti jangan sampai biaya pungutnya lebih besar daripada penerimaannya.

Prinsip-prinsip diatas perlu didukung dengan *benefit approach* dan *ability to pay approach* sehingga dapat menuju sistem perpajakan yang baik, (Suparmoko,1999:99)

1. *Benefit approach*

Pendekatan ini ditekankan pada prinsip pengenaan pajak berdasarkan pada manfaat yang diterima siwajib pajak dari pemerintah, sehingga yang menerima faedah yang paling banyak harus membayar dengan jumlah yang besar pula sesuai dengan perbandingan manfaat yang diterimanya.

2. *Ability to pay approach*

Pendekatan ini sering pula disebut sebagai prinsip kemampuan untuk membayar berdasarkan daya pikul siwajib pajak sesuai dengan kemampuannya membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda dikenai yang berbeda pula bebannya.

Penentuan tarif pajak merupakan aspek penting dalam aktifitas pajak daerah. Pada umumnya, tarif pajak daerah dapat dikelompokan dalam tiga struktur pajak (Suparmoko ,1999:112-126):

1. Pajak progresif

Pajak yang pengenaan pajaknya dengan prosentase tarif pajak semakin meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Pajak daerah yang termasuk golongan tarif ini mencakup antara lain: pendaftaran perusahaan, pajak penjualan minuman keras.

2. Pajak Proporsional

Pajak proporsional adalah pengenaan pajak dengan tarif tetap meskipun pendapatan dari subjek pajak meningkat, jenis pajak daerah yang termasuk pada kriteria pajak proporsional antara lain : pajak tontonan, pajak reklame.

3. Pajak Regresif

Sistem pengenaan pajak ini merupakan kebalikan dari sistem progresif, dimana prosentase pajak menurun dengan semakin meningkatnya pendapatan siwajib pajak. Contoh : pajak radio, pajak kendaraan tidak bermotor.

Menurut Dit.jen. Moneter Departemen Keuangan (dalam Suparmoko 1999:367 – 369) Berdasarkan jenisnya, pajak daerah terdiri dari:

1. pajak atas pertunjukan dan keramaian;
2. pajak reklame;
3. pajak anjing;
4. pajak atas ijin penjualan minuman keras;
5. pajak ijin penjualan dan pembuatan petasan dan kembang api;
6. pajak atas kendaraan bermotor;
7. pajak mengenai luas dan perhiasan kuburan;
8. pajak atas ijin mengadakan perjudian;
9. pajak berdiam disuatu daerah lebih daari 120 hari dalam satu tahun pajak kecuali untuk perawatan orang sakit;
10. pajak atas milik bangunan dan halaman yang berbatasan dengan jalan darat, diair dan lapangan;
11. pajak atas milik bangunan serta tanah kosong yang terletak dalam wilayah tertentu dari daerah;

12. pajak atas milik berupa bangunan serta halaman yang berbatasan dengan jalan umum di darat, air, atau dengan lapangan atau pajak atas tanah menurut rencana bangunan yang telah disahkan;
13. pajak sekolah yang semata-mata dipergunakan membiayai pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum dan pembelian perlengkapan pertama;
14. pajak penerangan jalan;
15. pajak pemberian air minum;
16. pajak rumah bola;
17. pajak forenzen;
18. pajak pendaftaran perusahaan ;
19. pajak rumah penginapan;
20. pajak atas mempunyai barang-barang yang menjulang diatas jalan, tanah dan bangunan yang dikuasi daerah;
21. pajak perusahaan ;
22. pajak kendaraan diatas air;
23. pajak pelabuhan perahu;
24. pajak pembikinan garam;
25. pajak pengangkutan garam keluar daerah;
26. pajak asuransi;
27. pajak pengusahaan kandang babi;
28. pajak pengambilan sarang burung;
29. pajak pengambilan rumput laut dan agar-agar laut;
30. pajak pengumpulan telur penyu;
31. pajak rumah-rumah asap;
32. pajak mendirikan rumah-rumah tembakau;
33. pajak pelelangan ikan;

Pajak pusat yang diserahkan kepada daerah tingkat II antara lain :

1. pajak radio;

2. pajak bahasa asing;
3. pajak jalan;
4. pajak kopra;
5. pajak potong hewan;
6. pajak pembangunan I.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah :

1. pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada kepala daerah sebagai pajak daerah;
2. penyerahan dilakukan berdasarkan undang - undang;
3. pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan lainnya;
4. hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.2.3.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan utama daerah lainnya yang memungkinkan menjadi sumber utama bagi daerah adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh balas jasa pekerjaan usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Kaho,1988:152).

Perbedaan antara retribusi dan pajak terletak pada balas jasa yang diterima oleh pembayarannya. Pada retribusi balas jasa dapat dirasakan secara langsung pembayarannya, sedangkan pajak tidak demikian. adapun ciri - ciri pokok yang melekat pada retribusi adalah sebagai berikut :

1. retribusi dipungut daerah;
2. pemungutan retribusi memberikan prestasi yang langsung dapat ditunjuk;
3. retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan daerah.

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor retribusi yang meningkatkan tarif retribusi dapat ditentukan sedemikian rupa, sehingga pemerintah daerah mendapat keuntungan yang layak. Pengenaan tarif retribusi harus disesuaikan dengan pemakaian atas pekerjaan atau jasa yang diberikan, dengan kata lain penggunaan tarif retribusi hendaknya tidak perlu tinggi tetapi memberikan keuntungan yang wajar dan dapat menutup biaya - biaya dalam penyediaan fasilitas termasuk biaya variabel maupun biaya tetap.

Kelangsungan penerimaan retribusi daerah perlu dijaga, oleh karena itu pemungutan retribusi hendaknya tidak merintangikan perkembangan dari suatu usaha serta menjamin kelangsungan perusahaan, atau pemungutan retribusi tidak merintangikan keluar masuknya barang. Menurut Dit.jen. Moneter Departemen keuangan (dalam Suparmoko 1999). Jenis retribusi daerah yang dinyatakan dan diserahkan kepada daerah tingkat II sebagai berikut :

1. uang leges;
2. bea jalan /jembatan;
3. bea pangkalan;
4. bea penambangan;
5. bea pemeriksaan /pembantaian;
6. uang sewa tanah/bangunan ;
7. uang sempadan/izin bangunan
8. uang atas pemakaian tanah;
9. uang bea penguburan;
10. retribusi pengerukan kakus;
11. retribusi pemberian ijin perusahaan perindustiran kecil;
12. retribusi pelelangan ikan;
13. uang pengujian kendaraan;
14. retribusi jembatan timbang;
15. retribusi stasion bus, taxi dan sebagainya;
16. retribusi pasar;

17. retribusi pesanggrahan;

18. retribusi atas pengeluaran hasil pertanian, hutan, dan laut;

2.2.3.3 Perusahaan Daerah

Sumber pendapatan asli daerah lainnya adalah perusahaan daerah. Pemerintah daerah diberi hak untuk mengelola perusahaan sendiri, yang merupakan perusahaan daerah. Oleh sebab itu dalam batas - batas tertentu pengelolaan perusahaan daerah harus bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.

Pengertian perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah. Berdasarkan pengertian tersebut tergambar dua fungsi pokok perusahaan daerah yaitu:

1. perusahaan daerah sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah;
2. perusahaan daerah sebagai penghasil pendapatan, yang berarti perusahaan harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah.

Undang-undang nomor 5 tahun 1962 pasal 5 menegaskan manfaat perusahaan daerah sebagai berikut:

1. Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. memberi jasa;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
 - c. memupuk pendapatan.
2. Tujuan perusahaan daerah adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menguatkan industrialisasi dan ketentraman serta ketenaga kerjaan dalam perusahaan, menuju masyarakat yan adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan diatas walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utamanya dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Jenis - jenis perusahaan daerah yang memungkinkan dapat dikelola oleh pemerintah daerah untuk pemasukan penerimaan daerah antara lain : perusahaan daerah air minum, perusahaan daerah listrik, perusahaan daerah pertambangan, lain-lain perusahaan daerah.

Menurut undang - undang 5 tahun 1962 pasal 25 ayat 2 perincian penggunaan laba bersih setelah dikurangi penyusutan, ditetapkan sebagai berikut:

1. perusahaan daerah yang memiliki modal seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan :
 - a. dana pembangunan daerah 30%;
 - b. anggaran belanja daerah 25%;
 - c. cadangan umum, sosial, pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiunan dan sokongan jumlah 45%.
2. perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan setelah dikurangi zakat yang dipandang perlu untuk dana pembangunan daerah 8% dan untuk anggaran belanja daerah 7% selebihnya untuk pemegang saham.

2.2.3.4 Dinas Daerah dan Pendapatan Lainnya

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Tujuan dan fungsi utama dinas daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhitungkan untung rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah.

Dinas – dinas diatur dalam undang – undang nomor 5 tahun 1974 pasal 49 yang menyatakan sebagai berikut (Kaho,1988 :215);

1. dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah;
2. pembentukan, susunan organisasi, dan formasi dinas daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan menteri Dalam Negri.

Lebih lanjut penjelasan umum undang – undang nomor 5 tahun 1994 disebutkan bahwa :

1. urusan–urusan yang dilaksanakan oleh dinas daerah tersebut adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah. Pembentukan dinas untuk daerah melaksanakan urusan–urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada kepala daerah dengan suatu undang–undang atau peraturan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya tidak dibenarkan;
2. dinas-dinas daerah sepenuhnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, dalam menjalankan tugasnya. Dinas – dinas yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah antara lain dinas pekerjaan umum, dinas lalu lintas jalan raya, dinas pendapatan daerah, dinas pertanian tanaman pangan, dinas kesehatan.

2.2.3.5 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan daerah dari bagi hasil pajak (*share Tax*) dan bukan pajak terutama diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelumnya disebut iuran pemerintah daerah (IPEDA), kemudian berdasarkan UU. No12 TH 1985 (dalam reformasi perpajakan) IPEDA diganti dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan dan dimasukkan pada daerah. Oleh karena itu, PBB disebut sebagai hasil pajak (*share tax*) dari pusat pada daerah(Arsjad,1992:121)

Cara pembagian hasil penerimaan PBB antara pusat dan daerah diatur dengan peraturan pemerintah nomer 47 tahun 1985 yang menyatakan bahwa 10% dari penerimaan PBB adalah untuk pemerintah pusat, selebihnya 90% ditransfer ke

daerah, yang 16,2% untuk pemerintah daerah tingkat I, selebihnya 64,8% untuk pemerintah daerah tingkat II, dan 9% sebagai upah pungut .

Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) adalah penerimaan daerah bukan asli yang berasal dari pemerintah pusat. IHH dan IHPH adalah dana pusat yang ditransfer tidak melalui APBN (tidak nampak dalam APBN) yang diatur dengan peraturan pemerintah No. 22 tahun 1980, disempurnakan dengan keppres No. 77 tahun 1985 dan terakhir dirubah dengan Keppres No.36 tahun 1989.

Cara pembagian dana ini kepada daerah adalah 45% dari penggunaan IHH dan IHPH digunakan untuk pembelanjaan pembangunan daerah, dimana daerah tingkat I diperoleh 30% sedangkan daerah tingkat II menerima 15%. Selanjutnya 20% lainnya digunakan untuk pembelanjaan rehabilitasi hutan secara nasional, sedangkan 15% untuk kehutanan daerah, sedangkan 20% pembayaran PBB untuk areal blok tebang.

2.2.3.6 Dana Perimbangan

Penyelenggaraan otonomi daerah perlu didukung dengan pemberian wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah. Wewenang yang diberikan hendaknya secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan dimasyarakat, sehingga perbedaan daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil (Kuriko Pratama,1999:122)

Berdasarkan uraian diatas bahwa dana perimbangan diberikan kepada daerah dengan tujuan :

1. memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah;
2. menciptakan sistem pemberdayaan daerah yang adil, proporsional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;
3. mewujudkan sistem perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat daerah yang memperhatikan pembagian tugas wewenang, dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomidaerah.

Prosentase pembagian dana perimbangan seperti dalam tabel di bawah ini, diharapkan dapat memperbesar pendapatan daerah untuk memperkuat struktur keuangan daerah.

Tabel 1

Penerimaan Daerah Berdasarkan Jenis Penerimaan dan Prosentase Pembagiannya			
NO	Jenis penerimaan	Pusat (%)	Daerah (%)
1.	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	10	90
2.	Hak atas tanah dan bangunan	20	80
3.	Pertambangan Minyak	85	15
4.	Gas alam	70	30
5.	Reboisasi	60	40
6.	Sumber Daya lam	20	80
7.	Perikanan	20	80

Sumber: UU. No.22 tahun 1999 Dalam Jawa pos, senin 3 Mei 1999, hal 21

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut secara singkat **anggaran (budget)** pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka – angka rupiah. Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah mempunyai peranan penting sekali dalam kegiatan pemerintah daerah karena APBD:

1. menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan;
2. merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang mudah dan berhasil;
3. merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab;
4. memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah;
5. merupakan pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas – batas tertentu.

Oleh karena itu penyusunan APBD haruslah dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan skala prioritas dan kepentingan daerah (Kansil ,1995:378).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara administratif terdiri dari dua pos yaitu pos pengeluaran dan pos penerimaan. Pos penerimaan terdiri dari pos penerimaan rutin dan pos penerimaan pembangunan sedangkan pada pos pengeluaran dibagi menjadi pos pengeluaran rutin dan pos pengeluaran pembangunan. Pos penerimaan rutin terdiri dari sisa anggaran tahun lalu, bagian PAD, bagian bagi pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan. Pos penerimaan pembangunan terdiri dari pinjaman pemerintah daerah dan pinjaman untuk badan usaha milik daerah. Pos pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran dinas/instansi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain dan pos pengeluaran diluar dinas atau instansi yang terdiri dari biaya pembayaran cicilan utang dan bunga, biaya ganjaran, subsidi dan bantuan pada daerah bawahan, biaya pensiunan atau bantuan dan onderstand, pengeluaran tidak termasuk bagian dan pengeluaran tidak tersangka. Pengeluaran

pengeluaran tidak termasuk bagian dan pengeluaran tidak tersangka. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik intra maupun suprastruktur antara lain yang ditunjukkan untuk membiayai proses perubahan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai, pengeluaran pembangunan ini merupakan seluruh sektor atau subsektor kehidupan masyarakat (Mamesah,1995 43 – 47).

Menurut Denhart(1995 dalam manajemen pembangunan) anggaran setidak – tidaknya memiliki tiga fungsi antara lain : 1) sebagai instrumen kebijakan fiskal; 2) sebagai alat untuk melaksanakan fungsi menejerial; 3) sebagai instrument kebijakan publik. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, anggaran dibahas dalam kontek ”*where money come from*“ melalui anggaran dimungkinkan untuk mempertanyakan darimana pemerintah daerah dapat mendatangkan uang untuk digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi anggaran sebagai suatu alat menejerial bagi pemerintah daerah terlihat jelas dari alokasi belanja yang dilakukan oleh daerah tingkat II. Melalui APBD, terlihat adanya belanja rutin dan belanja pembangunan yang merupakan cara bagi pemerintah daerah melakukan kegiatan managerial dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintah daerah tingkat II. Fungsi anggaran sebagai instrumen kebijakan publik bagi pemerintah daerah tingkat II berkenaan dengan “*Where the money goes*”, melalui dan pada anggaran pemerintah dati II akan terlihat jelas sektor yang dan bidang yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Singkat kata sebagai instrumen kebijakan publik, anggaran akan berkaitan dengan banyak *discretionary spending*, yang dilakukan oleh dati II. Keleluasaan yang dimiliki berupa keleluasaan untuk membelanjakan APBD dimiliki oleh dati tingkat II.

2.2.5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Upaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah dapat ditempuh melalui dua cara yaitu ekstensifikasi dan Intensifikasi. Intensifikasi dan ekstensifikasi ini pada umumnya dilakukan pada pajak dan retribusi daerah.

Intensifikasi perpajakan dan retribusi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada usaha untuk menggali lebih dalam objek – objek yang belum terkena, karena masih tersembunyi atau memang sengaja disembunyikan. Intensifikasi ini meliputi juga kegiatan untuk menagih semua tunggakan pajak yang masih terutang atau belum terbayar, jadi intensifikasi mengandung arti kegiatan untuk mencari atau memungut objek pajak dan retribusi yang belum terkena. Bertambahnya jumlah objek pajak dan retribusi yang harus dikenakan, maka akan bertambah pula penerimaan yang dipungut. Beberapa usaha yang termasuk dalam usaha intensifikasi antara lain :

1. mencari dan mengusut objek pajak dan retribusi yang belum terkena;
2. memberikan rangsangan pada petugas pemungut dalam bentuk materi supaya petugas tersebut dapat lebih ditingkatkan mutu kerja secara jujur dalam setiap unsur keuangan dan juga untuk lebih meningkatkan kreatifitas dan etos kerja;
3. memberikan keringanan – keringanan terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk merangsang penyelenggaraan aktifitas yang menimbulkan pungutan pajak dan retribusi;
4. memperbaiki aktifitas pemungutan dan pengawasan secara efektif untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran – kebocoran yang jelas merugikan instansi;
5. meningkatkan koordinasi yang terpadu diantara sesama aparatur dilingkungan kerja serta pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat;
6. memperbaiki kinerja interen.

Ekstensifikasi perpajakan adalah kegiatan yang ditunjukkan kepada usaha untuk memperluas dari subjek pajak yang karena belum dikenal dalam administrasi perpajakan. Pada prinsipnya ekstensifikasi perpajakan adalah memperbanyak subjek pajak. Beberapa usaha ekstensifikasi antara lain :

1. mencari dan menggali subjek pajak dan retribusi yang belum terkena;
2. adanya penyuluhan tentang manfaat dan kegunaan pajak maupun retribusi dan memberikan penjelasan tentang pemungutannya adalah untuk pembangunan;
3. adanya koordinasi yang terpadu dengan instansi yang terkait terutama untuk memperoleh data dan objek pajak dan retribusi baru yang seharusnya ditetapkan adanya;
4. diperketatnya pengawasan keluar terhadap pengawasan pengusaha penyelenggaraan hiburan dan keramaian oleh petugas operasional;
5. lain – lain memperbaiki kinerja eksteren.

2.2.6 Tingkat Kemandirian Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga meningkatkan keseimbangan ekonomi antar daerah. Salah satu syarat penting bagi peningkatan pengembangan ekonomi antar daerah adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerah terlihat dari perkembangan pendapatan daerah (khususnya PAD) yang positif dari sisi penerimaan dari tahun ke tahun.

Penyelenggaraan otonomi yang sehat hanya bisa dicapai apabila sumber-sumber keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kebutuhan rutin pemerintah daerah berasal dari pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah, secara keseluruhan untuk mendorong kemampuan pemerintah dalam mengatur mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Menurut Pamuji (dalam Kaho,1988:124) salah satu kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (kemandirian daerah) adalah kemampuan *self supporting* dalam

bidang keuangan. Jadi faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan (kemandirian) daerah dalam melaksanakan otonominya (Kaho,1988:123).

Tingkat kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran paling rutinnya dihitung dengan menggunakan metode penghitungan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) daerah (Esmara,1986:226). Angka Indeks Kemampuan Rutin dapat diperoleh dengan cara melakukan perbandingan antara besarnya total pendapatan asli daerah dengan total pengeluaran rutin daerah setiap tahunnya.

Indek Kemampuan Rutin merupakan angka yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan paling minimumnya melalui PAD yang diperoleh. Apabila angka IKR lebih besar atau sama dengan seratus persen maka pendapatan daerah yang diperoleh dapat membiayai kebutuhan pengeluaran rutin daerah tersebut secara keseluruhan, dan sebaliknya. Semakin besar pengeluaran rutin yang dapat dibiayai oleh pendapatan daerah yang dimiliki maka Indeks Kemampuan Rutin suatu daerah semakin tinggi, sehingga tingkat kemandirian suatu daerah mejadi semakin besar.

2.2.7 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi belanja rutin yaitu biaya untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, serta belanja pembangunan, yaitu pengeluaran untuk pembangunan fisik seperti jalan, gedung-gedung dan lain-lain maupun pembangunan nonfisik (Soetrisno,1991:339 –340).

Pengeluaran pemerintah semakin tahun semakin meningkat. Peningkatan tersebut karena kegiatan dan kebutuhan pemerintah yang mempunyai kaitan yang erat dengan tugas dan fungsi pemerintah. Tendensi meningkatnya pengeluaran pemerintah ini oleh A. Wagner dinamakan hukum meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah. Inti dari hukum Wagner tersebut adalah makin meningkatnya peranan

pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat makin meningkatkan pengeluaran pemerintah. Jadi meningkatnya pengeluaran pemerintah tersebut akibat meningkatnya kebutuhan pemerintah yang mempunyai kaitannya dengan fungsi pemerintah, termasuk penggunaan sumber daya ekonomi.

Sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah adalah sbb :

1. perang, pengeluaran untuk keperluan perang ini sulit dikurangi meskipun perang telah usai. Pengeluaran tetap diadakan untuk tentara-tentara dan harus pula ada subsidi bagi para veteran dan lain sebagainya;
2. kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat maka jelas kebutuhan akan konsumsi barang dan jasa akan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya;
3. urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi, harus dilayani dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum, perumahan, keamanan dan kesehatan;
4. perkembangan demokrasi, memerlukan biaya yang besar untuk mengadakan musyawarah, pungutan suara dan lain - lain;
5. seringkali mungkin berkembangnya peran pemerintah itu sendiri justru mengakibatkan ketidakefisienan, pemborosan dan birokrasi;
6. dinegara sedang berkembang peran pemerintah dalam pembangunan sebagai penggerak dan pelopor dalam pembangunan tersebut (Suparmoko,1996:19 – 20).

2.2.7.1 Pengeluaran Rutin Daerah

Kegiatan pemerintah daerah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Jika anggaran belanja rutin menunjukkan angka yang lebih besar dari anggaran belanja pembangunan, hal ini berarti bahwa sebagian dana yang tersedia dari seluruh penerimaan daerah lebih banyak dipakai untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang bersifat konsumtif dan lebih sedikit yang digunakan untuk investasi.

Anggaran belanja pembangunan yang lebih besar dari Anggaran belanja rutin perlu dinilai positif, karena anggaran belanja yang demikian sangat bermanfaat

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Anggaran belanja rutin dikatakan bersifat konsumtif, tetapi anggaran belanja rutin itu tidak berarti tidak diperlukan, apalagi karena sangat berguna untuk menunjang pembangunan, serta pengeluaran rutin meningkat sejalan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang semakin berhasil (Suparmoko, 1999:79)

Pengeluaran rutin atau belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Belanja rutin ini terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

Belanja pegawai adalah untuk pembayaran gaji dan upah pegawai termasuk gaji pokok dengan segala macam tunjangan (*Toeslag*) atau tambahan-tambahannya. Belanja barang adalah untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari seperti untuk pembelian kertas, tinta, pita, karbon, kapur dan alat-alat tulis untuk sekolah dll.

Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah (barang-barang kapital tetap) seperti gedung, kendaraan, perabot rumah tangga dan lain-lain tetap terpelihara secara baik. Belanja perjalanan adalah biaya untuk perjalanan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan seperti pembelian bensin, karcis kereta api, penginapan hotel dan sebagainya.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka dan landasan teori maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

1. Komponen prioritas pendapatan daerah di Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 secara berturut – turut sebagai berikut : 1) komponen Bagi hasil pajak bukan pajak; 2) komponen penerimaan dinas – dinas; 3) komponen retribusi ; 4) komponen pajak ; 5) komponen penerimaan lain – lain; 6) komponen penerimaan laba BUMD
2. pertumbuhan rata – rata komponen prioritas pendapatan daerah diatas 10%

3. estimasi pendapatan daerah mulai tahun 2001 sampai tahun 2005 mengalami kenaikan dan dapat menopang keuangan daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.





III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Exspose Fakta yaitu berisi pendiskripsian atau penggambaran suatu fenomena untuk mengambil keputusan secara umum (general).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Kediri.

3.2 Prosedur Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan dan juga mencari data pada instansi terkait, seperti Kantor Bappeda, Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Statistik dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder runtun waktu kuartalan mulai tahun anggaran 1995/1996.1 – 1999/2000.4 atau dilakukan sebanyak 20 pengamatan, akan tetapi jika tidak tersedia data dalam bentuk kuartalan maka akan digunakan metode interpolasi linier(Isukindro,1985:171)

$$Q_{kt} = 1/4 Y_t(1 + (k - 2,5) (1 - B)/ 4)$$

$$Q_{kt} = \text{data kuartalan ke } k \text{ tahun } t$$

$$Y_t = \text{data tahun } t$$

$$B = \text{operasi kelambanan ke udik (Backward Log Operator)}$$

Penelitian ini diambil di kabupaten Kediri, dengan pertimbangan selama tahun 1995/1996 – 1999/2000 peningkatan pertumbuhan yang terjadi pada pengeluaran rutin lebih besar dari penerimaan yang berasal dari potensi daerah yang

dimilikinya (seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini) sehingga pemerintah selalu kesulitan dana untuk menutupinya. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan semakin banyaknya pelimpahan tenaga yang berasal dari pusat yang menjadi tanggungan daerah.

Tabel 2 : Perbandingan Perkembangan Pengeluaran Rutin Dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Pengeluaran Rutin(ribuan)	Perkembangan Persen(%)	Pendapatan daerah(ribuan)	Perkembangan Persen(%)
1995/1996	23.337.788		13.067.139,16	
1996/1997	16.283.839	22,09%	17.786.763,968	36,12%
1997/1998	20.216.442	24,15%	19.772/910,184	11,17%
1998/1999	75.690.047	274,39%	22.931.955,061	15,98%
1999/2000	133.097.021	49,42%	24.229.578,285	5,66%

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan komponen prioritas pendapatan daerah menggunakan analisis Skalogram(*skalling*). *Skalling* dimaksudkan untuk menentukan skala prioritas melalui perengkingan terhadap komponen pendapatan daerah yang ada pada satu kabupaten, dimana besaran hasil *skalling* ini angka relatif diantara 0 – 100 (Budiharsono,1989:337)

$$NS = \frac{Ni - N \text{ min}}{N \text{ max} - N \text{ min}} \times 100$$

Ns = nilai *skalling*, menunjukkan skala prioritas atau rengking ;

Ni = nilai observasi ke 1, 2, 3,....dst;

N min = nilai observasi terkecil;

Nmax = nilai observasi terbesar

2. tingkat pertumbuhan rata-rata komponen prioritas pendapatan daerah setiap tahun dihitung dengan rumus rata-rata geometrik (Dajan,1995:154)

$$\log Gm = \frac{\sum_{i=1}^n \log Xi}{n}$$

Gm = tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan komponen PAD prioritas setiap tahun

X_i = prosentase pertumbuhan jumlah penerimaan komponen PAD prioritas dihitung dari t -1

N = Jumlah tahun yang dihitung

3. estimasi atau perkiraan besarnya jumlah pendapatan daerah mulai tahun anggaran 2000/2001 sampai tahun 2004/2005 dihitung dengan *Trend* metode *Least Square* (Subagyo,1991: 35)

$$Y = a + bX$$

Y = nilai trend pada tahun yang ditentukan;

a = PAD pada tahun dasar;

b = pertambahan yang terjadi srtiap satuan waktu

X = Koding tahun (interval waktu);

$$a = \frac{\sum y}{n} \qquad b = \frac{\sum y \cdot x}{\sum x^2}$$

y = nilai PAD yang diestimasi

x = urutan tahun yang diestimasi

n = jumlah tahun

3.1 Uji normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui normalitas dari variabel pengganggu. Uji ini dapat dilakukan dengan uji t maupun uji F. Jika variabel pengganggu tidak terdistribusi secara normal tidaklah mengganggu kebaikan penaksir yang diperoleh, karena asas penaksir BLU tidaklah tergantung pada anggapan

tentang bentuk distribusi variabel pengganggu, maka walaupun anggapan normalitas ini ternyata tidak benar, penaksir yang diperoleh tetap BLU (Soelistiyo, 1992: 256)

Selanjutnya dalam mengestimasi tingkat kemandirian daerah dihitung dengan menggunakan kemampuan rutin (IKR) (Esmara, 1986 :226) sebagai berikut :

$$IKR = \frac{\text{JumlahPenerimaanyangberasal dari potensi yang dimiliki daerah}}{\text{JumlahPengeluaranRutin}} \times 100\%$$

Dengan kriteria :

IKR \geq 100 artinya pemerintah daerah telah mampu membiayai seluruh pengeluaran rutinnya dengan pendapatan daerahnya sendiri;

IKR $<$ 100 artinya pemerintah daerah belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutinnya dengan pendapatan daerahnya sendiri;

Asumsi –asumsi :

1. Sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan dari potensi daerah;
2. Pola pengeluaran rutin dinas/instansi/lembaga pemerintah daerah berdasarkan UU.No.22/1999 sama dengan pengeluaran rutin berdasarkan UU. No.5/1974.

3.4 Definisi Variabel Operasional

1. pendapatan daerah yang dimaksud disini adalah semua pendapatan yang diperoleh dari potensi ekonomi daerah termasuk didalamnya dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan digunakan oleh daerah untuk membiayai pengeluaran daerah baik secara langsung sepenuhnya maupun sebagian tertentu, pendapatan daerah ini dihitung dengan satuan ribuan rupiah
2. komponen pendapatan daerah adalah bagian dari pendapatan daerah, yang merupakan kumpulan dari sejumlah sub komponen atau item pendapatan daerah
3. komponen prioritas pendapatan daerah adalah komponen dalam pendapatan daerah yang produktif dan memiliki keunggulan dibanding dengan komponen yang lain, komponen prioritas ini dihitung dengan menggunakan angka nominal 0 –100 ;



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Perekonomian

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Kediri merupakan usaha yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan regional Jawa Timur dan pembangunan nasional. Pembangunan ini dilaksanakan sebagai usaha dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Kabupaten Kediri khususnya. Pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau batiniah saja, akan tetapi mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Keadaan perekonomian suatu daerah secara keseluruhan dapat diketahui dengan melihat beberapa indikator ekonomi daerah seperti PDRB, Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan infrastruktur pendukung.

PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilik faktor produksi. Sejak tahun 1995 PDRB kabupaten Kediri mengalami perkembangan yang cenderung meningkat seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Perkembangan PDRB Kabupaten Kediri selama tahun 1995 –2000 menurut harga konstan (dalam jutaan)

Tahun	PDRB	Perkembangan (%)
1995	1.265.595,26	
1996	1.352.741,09	6,88%
1997	1.415.901,7	4,67%
1998	1.415.188,36	-0,05%
1999	1.429.888,47	1,04%
2000	1.488.131,91	4,07%
rata – rata		3,322%

Sumber : BPS Kabupaten Kediri tahun 2000

Selama tahun 1995 –2000 PDRB Kabupaten Kediri rata – rata mengalami pertumbuhan sebesar 3,322% pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1996 yaitu sebesar 6,88 % dari tahun sebelumnya dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu mengalami penurunan sebesar –0,05% dari tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Kediri ditopang oleh tiga sektor ekonomi utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, dan industri.

Tolok ukur keberhasilan lainnya adalah pendapatan perkapita, dimana pendapatan ini menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Tingkat kemakmuran penduduk merupakan tujuan daripada pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini besarnya tingkat PDRB suatu daerah, tidak menjamin tingginya kemakmuran suatu daerah, karena masih perlu melihat besar kecilnya penduduk daerah yang bersangkutan. Jadi apabila jumlah PDRBnya besar jumlah penduduknya kecil, maka berarti tingkat kemakmuran daerah tersebut tinggi dan sebaliknya. Lihat tabel dibawah ini yang menyajikan perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Kediri selama tahun 1995 –2000

Tabel 4: Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kediri tahun 1995 –2000 (dalam ribuan)

Tahun	Pendapatan Perkapita	Perkembangan(%)
1995	975,102	
1996	1.017,018	4,30%
1997	1.061,454	4,37%
1998	1.055,700	-0,54%
1999	1.058,215	0,24%
2000	1.081,639	2,46%
Rata – rata		2,12%

Sumber: BPS Kabupaten Kediri tahun 2000

Pada tabel 4 terlihat bahwa pendapatan perkapita Kabupaten Kediri dari tahun 1995 - 2000 secara riil cenderung meningkat, kecuali pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 0,54% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang cukup lesu karena badai krisis. Selama tahun tersebut rata – rata pendapatan perkapita penduduk kabupaten Kediri mengalami kenaikan sebesar 2,12 %, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar 4,37% dari

tahun sebelumnya. Kondisi pendapatan perkapita yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran penduduk juga meningkat. Upaya pemerintah guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, diantaranya tercermin dalam usaha meningkatkan pendapatan perkapitanya.

Pada sisi Infrastruktur ekonomi menunjukkan bahwa di Kabupaten Kediri terdapat 190 buah bank yang terdiri dari 1 buah kantor cabang BI, 50 buah bank umum, 29 buah bank BPR, dan lembaga dana kredit pedesaan sejumlah 102 buah yang mampu menggalang sebesar 14.298 penabung dengan nilai dana yang terkumpul 20.169 juta rupiah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya aktiva bank tahun 2000 meningkat sebesar 49,99% (3.419.038 juta rupiah) dari pos penghimpunan dana sebesar 3.214.059 juta rupiah dan penyaluran kredit sebesar 415.636 juta rupiah. Di kabupaten Kediri terdapat 495 koperasi yang terdiri dari 489 koperasi primer dan 6 koperasi pusat. Modal yang berhasil dihimpun pada koperasi yang ada tersebut mencapai 293.539 juta rupiah diantaranya dari modal sendiri sebesar 32.228 juta rupiah, modal luar 71.395 juta rupiah, volume usaha 84.050 juta rupiah dan dari anggota mencapai 103.623 juta rupiah, serta dari hasil usaha sebesar 2.243 juta rupiah.

4.2 Kondisi Keuangan Daerah

Keuangan daerah mengandung arti setiap hak berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan pengaturan yang berlaku. Faktor keuangan ini penting dalam setiap kegiatan pemerintah, karena tidak ada kegiatan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien dengan tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri di dukung oleh 6 komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, penerimaan dari dinas- dinas, bagi hasil pajak bukan pajak dan penerimaan lain – lain. Tabel 5 memperlihatkan

besarnya prosentase masing – masing komponen pendapatan daerah dalam mendukung keuangan pendapatan daerah.

Tabel 5 : Besarnya Sumbangan Penerimaan Komponen - Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996- 1999/2000.(dalam persen)

Komponen Pendapatan daerah	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	rata-rata
Pajak Daerah	14,12%	10,81%	6,68%	13,43%	14,82%	11,92%
Retribusi Daerah	21,83%	22,71%	17,46%	8,505%	9,001%	15,902%
Laba BUMD	0,76%	0,48%	0,83%	1,15%	0,68%	0,774%
Dinas – Dinas	13,67%	12,37%	19,03%	18,93%	14,36%	15,672%
Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	48,75%	52,69%	54,88%	57,07%	60,34%	54,75%
Lain –lain	0,86%	0,94%	1,11%	0,9%	0,79%	0,92%

Sumber : Lampiran 35

Berdasarkan tabel diatas penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 adalah komponen bagi hasil pajak, yang rata – rata memberikan kontribusinya sebesar 54,75% pertahun selama periode tersebut. Penyumbang terbesar kedua terdiri dari komponen retribusi daerah, kondisi ini terjadi pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 yaitu sebesar 21,83% dan 22,71%. Pada tahun anggaran 1997/1998 dan 1998/1999 posisi retribusi daerah digantikan oleh komponen penerimaan dinas – dinas, yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah sebesar 11,98% dan 18,93%. Secara rata – rata koponen pajak daerah menempati urutan keempat dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kediri, yaitu sebesar 11,98% pertahun. Hal yang menyebabkan semakin menurunnya kontribusi komponen retribusi daerah terhadap pendapatan daerah adalah dihapuskannya beberapa jenis pungutan retribusi sesuai dengan UU.No. 17 Tahun 1997. Pada tahun anggaran 1999/2000 pajak daerah memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan

daerah, jika dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi dan dinas – dinas yaitu sebesar 14,79%. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pajak penerangan jalan umum seperti terlihat pada lampiran 2. Secara rata – rata selama periode tersebut komponen bagi hasil pajak merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan daerah kabupaten Kediri yaitu sebesar 53,16 %, dan komponen yang memberikan kontribusi terkecil adalah komponen penerimaan laba dari BUMD yaitu sebesar 0,774%.

4.2.1 Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah merupakan penyumbang terbesar keempat setelah bagi hasil pajak, dinas – dinas, dan retribusi pajak. Berdasarkan Lampiran 2 penerimaan terbesar dari komponen pajak daerah berasal dari pajak penerangan jalan umum, yang rata - rata memberikan sumbangan sebesar Rp.1.742.979.888,00 pertahun selama periode tersebut. Pajak penerimaan pembagian iuran air bawah tanah memberikan sumbangan yang cukup besar pada penerimaan pajak daerah, meskipun pajak ini baru dipungut selama dua tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 ternyata memberikan sumbangan yang cukup besar dibandingkan sub komponen yang lain seperti pajak reklame yang dipungut selama lima tahun anggaran.

Pajak reklame menunjukkan peningkatan di dalam penerimaannya rata – rata sebesar Rp.54.654.367,2 pertahun, dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak dari pajak reklame ini berarti menunjukkan peningkatan volume pada wajib pajak. Perkembangan ini diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan kegiatan pembangunan. Pajak yang lain seperti pajak hotel dan restoran, hiburan dan pajak bahan galian golongan C terus mengalami peningkatan hal ini disebabkan lebih intensifnya pengawasan yang dilakukan, sehingga menyebabkan tertibnya pembayaran dari pengusaha. Sasaran penarikan pajak ini adalah menarik sumber pendapatan daerah karena dapat dipakai sebagai alat penerimaan daerah untuk memantapkan landasan ekonomi daerah. Tabel dibawah ini menyajikan

perkembangan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tabel 6 : Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000

Tahun	Penerimaan Pajak	Perkembangan	
		Ribuan	(%)
1995/1996	1.941.546,493		
1996/1997	2.105.005,337	163.458,844	8,42%
1997/1998	1.262.413,925	-842.591,412	-40,03%
1998/1999	3.076.757.008	1.814.343,163	143,72%
1999/2000	3.584.064,031	507.306,943	16,49%
	rata –rata		58,24%

Sumber : Dispenda Kabupaten Kediri 1995/1996 –1999/2000 diolah

Berdasarkan tabel diatas ternyata dari tahun ketahun penerimaan pajak daerah secara kuantitatif terus mengalami peningkatan, kecuali Pada tahun anggaran 1997/1998 mengalami penurunan sebesar Rp.842.591.412.000,00 dari tahun sebelumnya atau mengalami penurunan sebesar 40,03%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar 143,72% dari tahun sebelumnya dan kenaikan terendah terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 15,32% dari tahun sebelumnya. Secara rata – rata dalam periode tersebut penerimaan pajak daerah mengalami perkembangan sebesar 58,24%.

4.2.2 Retribusi Daerah

Komponen retribusi daerah merupakan penerimaan terbesar ketiga setelah penerimaan bagi hasil pajak bukan pajak dan dinas - dinas tiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi sejak tahun anggaran 1998/1999 penerimaan retribusi ini mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh dihapuskannya beberapa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah (lihat tabel 6). Selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 yang menjadi pendukung utama komponen retribusi daerah

di kabupaten Kediri adalah : 1) retribusi pasar; 2) ijin bangunan; 3) retribusi kebersihan; 4) retribusi pendaftaran penduduk KTP/KK; 5) retribusi puskesmas dan balai pengobatan; (lihat lampiran 3). Tabel dibawah ini menggambarkan perkembangan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000.

Tabel 7 : Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Kediri tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000

Tahun	Penerimaan Retribusi	Perkembangan	
		Ribuan	(%)
1995/1996	3.002.787,649		
1996/1997	4.421.103,317	1.418.315,623	47,23%
1997/1998	3.297.384,801	-1.123.718,516	-25,42%
1998/1999	1.947.512,371	-1.249.872,430	-40,94%
1999/2000	2.176.553,48	-99.486,043	11,76%
Rata-rata			-1,84%

Sumber: Dispenda Kabupaten Kediri tahun 1995/1996 –1999/2000 diolah

Berdasarkan tabel diatas retribusi daerah kabupaten Kediri secara rata – rata mengalami perkembangan negatif sebesar 1,84%. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 4.421.103.317,00 atau mengalami peningkatan sebesar 47,23 dari tahun sebelumnya, sedangkan penerimaan terendah terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar Rp. 1.947.512.371,00 atau mengalami penurunan sebesar 40,94% dari tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan lampiran 3 penerimaan dari retribusi pasar ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun anggaran 1995/1996 penerimaan pada pos ini sebesar Rp 641.092.078,00 dan pada tahun anggaran 1999/2000 mencapai Rp1.042.464.091,00. Peningkatan pada retribusi pasar ini disebabkan oleh semakin meningkatnya aktifitas perekonomian dari masyarakat itu sendiri dan juga dipengaruhi oleh kemajuan – kemajuan yang telah dicapai dibidang pembangunan ekonomi pada umumnya. Retribusi kebersihan merupakan penyumbang terbesar

kedua setelah retribusi pasar. Pada tahun anggaran 1995/1996 –1997/1998 penerimaan dari retribusi kebersihan ini terus - menerus meningkat yang berturut – turut sebagai berikut Rp.475.089.728,-, Rp.491.845.730,- , dan Rp 560.623.216,-. Pada tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 penerimaan pada retribusi kebersihan mengalami penurunan sebesar Rp.365.767.426,- dari tahun anggaran 1997/1998 dan Rp 30.654.475,- dari tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan dari retribusi pendaftaran KTP/KK, pemakaian kekayaan daerah, retribusi ijin bangunan, retribusi puskesmas dan balai pengobatan cukup fluktuatif, tetapi memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan retribusi daerah Kabupaten Kediri.

4.2.3 Laba BUMD

Laba perusahaan milik daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan bukan pajak. Badan Usaha Milik Daerah yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kediri antara lain : 1) Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim); 2) Perusahaan daerah Canda Bhirawa; 3) Bank Pasar; 4) Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo. Tabel dibawah ini menyajikan perkembangan penerimaan pendapatan laba perusahaan daerah di Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000.

Tabel 8 : Perkembangan Penerimaan Pendapatan Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000 dalam (ribuan)

Tahun	Penerimaan Laba BUMD	Perkembangan	
		Ribuan	Persen (%)
1995/1996	105.470,644		
1996/1997	93.723,2	-11.747,446	-11,13%
1997/1998	156.103,803	62.380,605	66,56%
1998/1999	264.478,365	108.374,201	69,42%
1999/2000	164.991,961	-99.486,043	-37,62%
	rata – rata		21,81%

Sumber :Dispenda Kabupaten kediri tahun 1995/1996 –1999/2000

Penerimaan dari komponen ini selama kurun waktu lima tahun anggaran, dari tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 cenderung fluktuatif. Selama periode tersebut rata – rata penerimaan dari pos ini mengalami perkembangan sebesar

21,81%. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp 264.478.365,00. atau mengalami kenaikan sebesar 69,42% dari tahun sebelumnya dan penerimaan terendah terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu sebesar Rp93.723.200,00 atau mengalami penurunan sebesar -11,13% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan lampiran 4 penurunan dan kenaikan yang terjadi pada komponen penerimaan laba BUMD ini terjadi disebabkan oleh terjadinya kenaikan dan penurunan pada penerimaan Perusahaan Perkebunan Margomulyo. Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo ini merupakan penyumbang terbesar pada pos penerimaan laba BUMD Kabupaten Kediri.

4.2.4 Penerimaan Dinas – Dinas

Penerimaan dinas – dinas merupakan komponen pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan bukan pajak. Dinas – dinas yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pare, Dinas Perikanan Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Pangan Daerah, Dinas Peternakan daerah. Jumlah penerimaan dari dinas – dinas ini secara kuantitatif cenderung mengalami peningkatan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9: Perkembangan Penerimaan Dinas- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000

Tahun	Penerimaan Dinas- dinas	Perkembangan	
		Ribuan	Persen(%)
1995/1996	1.880.055,615		
1996/1997	2.407.505,139	527.449,524	28,05%
1997/1998	3.594.054,991	1.186.549,852	49,28%
1998/1999	4.333.899,275	739.844,284	20,58%
1999/2000	3.472.745,394	-861.153,881	-19,87%
rata – rata			19,51%

Sumber : Dispenda Kabupaten Kediri tahun 1995/1996 –1999/2000

Selama lima tahun anggaran tersebut rata – rata penerimaan dinas – dinas mengalami perkembangan sebesar 19,51% pertahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada

tahun anggaran 1997/1998 yang mengalami kenaikan sebesar 49,28% dari tahun sebelumnya. Selama kurun waktu lima tahun anggaran telah terjadi penurunan sebanyak satu kali yaitu pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. -861.153,881- atau sebesar 19,87% dari tahun sebelumnya.

Menurut lampiran 6 yang menjadi penyumbang terbesar pada komponen penerimaan dinas ini adalah penerimaan Rumah Sakit Daerah Pare (RSUD Pare), rata – rata tiap tahunnya memberikan kontribusinya sebesar Rp.3.007.452.923,00. Penurunan yang terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari RSUD Pare sebesar Rp.977.368.881,00 dari tahun anggaran sebelumnya. Besarnya penerimaan RSUD Pare ini disebabkan oleh usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dibidang kesehatan baik berupa pengembangan RSUD dan peningkatan pelayanan.

4.2.5 Penerimaan Lain –Lain

Penerimaan lain – lain pendapatan daerah ini merupakan komponen penerimaan pendapatan daerah yang bersifat sebagai pendukung bagi penerimaan daerah. Selama 5 tahun anggaran mulai tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 yang menjadi pendukung komponen penerimaan lain – lain pendapatan daerah kabupaten Kediri yaitu: 1) penerimaan lain – lain; 2) penerimaan jasa giro dari bank pembangunan daerah; 3) hasil penjualan rupa – rupa barang milik daerah; 4) deviden dari hasil saham pembangunan daerah; 5) penerimaan ganti rugi kendaraan yang dihapus.

Tabel dibawah ini memperlihatkan perkembangan penerimaan lain – lain pendapatan daerah kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000.

Tabel 10: Perkembangan Penerimaan lain – lain Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Penerimaan lain -lain	Perkembangan	
		Ribuan	Persen (%)
1995/1996	118.419,689		
1996/1997	182.231,114	63.811,425	53,87%
1997/1998	210.009,777	27.868,663	15,29%
1998/1999	206.276,365	-3.823,412	-1,82%
1999/2000	191.671,961	-14.604,896	7,08%
	rata –rata		15,07%

Sumber: Dispenda Kabupaten Kediri tahun 1995/1996 – 1999/2000

Pada tabel 10 terlihat penerimaan pada komponen penerimaan lain – lain pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan, selama tahun anggaran 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 komponen ini terus mengalami kenaikan secara kuantitatif, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu sebesar 53,87% dari tahun anggaran sebelumnya dan pada tahun anggaran 1999/2000 mengalami penurunan sebesar Rp. 14.604.896,00 atau 7,08% dari tahun anggaran sebelumnya. Secara rata – rata penerimaan lain – lain pendapatan daerah ini mengalami perkembangan sebesar 15,07%%

4.2.6 Penerimaan Bagi Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak merupakan komponen terbesar yang memberikan kontribusinya pada pendapatan daerah kabupaten Kediri selama 5 tahun anggaran mulai 1995/1996 – 1999/2000. Secara kuantitatif penerimaan pada komponen bagi hasil pajak dan bukan pajak ini terus mengalami peningkatan, meskipun perkembangan dari tahun ketahunnya berjalan secara fluktuatif seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11 : Penerimaan Perkembangan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Kabupaten Kediri Selama Tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Bagi hasil pajak Bukan Pajak	Perkembangan	
		Ribuan	Persen (%)
1995/1996	6.706.465,717		
1996/1997	10.255.658,464	3.549.192,747	52,925
1997/1998	10.265.463,160	109.804,696	1,07%
1998/1999	13.069.109.380	2.703.646,220	26,08%
1999/200	14.592.031,948	1.522.922,568	11,65%
Rata- rata			22,93%

Sumber : Dispenda Kabupaten Kediri tahun 1995/1996 – 1999/2000

Berdasarkan tabel diatas secara rata – rata penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak ini mengalami perkembangan sebesar 22,93 %. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 sebesar 52,925% dari tahun anggaran sebelumnya dan perkembangan terendah terjadi pada tahun 1997/1998 sebesar 1,07% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan lampiran 7 penyumbang terbesar komponen bagi pajak dan bukan pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang rata – rata tiap tahunnya memberikan kontribusinya sebesar Rp.8.902.895.204,00. Penerimaan dari PBB ini diperkirakan akan terus semakin meningkat, seiring dengan terus semakin meningkatnya objek Pajak PBB itu sendiri

4.2.7 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk memelihara atau menyelenggarakan kegiatan operasional pemerintahan sehari – hari. Pengeluaran rutin daerah dalam APBD meliputi :1) pengeluaran dinas – dinas atau instansi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan,

belanja perjalanan dinas, dan belanja lain – lain; 2) Pengeluaran diluar dinas - dinas atau instansi yang meliputi pembayaran cicilan utang, dan bunga, biaya ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada pemerintah dibawahnya, biaya pensiun/bantuan dan onderstand, pengeluaran yang tidak termasuk bagian dari pengeluaran rutin.

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik infra maupun suprastruktur daerah atau pengeluaran yang ditunjukkan untuk membiayai proses perubahan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Pengeluaran pembangunan ini meliputi pengeluaran seluruh sektor/subsektor kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran daerah Kabupaten Kediri dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 12: Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000.

Tahun	Pengeluaran Rutin (%)	Pengeluaran Pembangunan (%)	Total pengeluaran (ribuan)
1995/1996	43,62%	56,38%	30.568.283
1996/1997	43,83%	56,17%	37.155.508
1997/1998	43,15%	56,85%	46.851.467
1998/1999	76,07%	23,93%	99.502.770
1999/2000	79,32%	20,68%	142.577.404
Rata – rata	57,2%	42,8%	

Sumber :BPS Kabupaten Kediri tahun 1995/1996 –1999/2000

Berdasarkan tabel diatas pengeluaran rutin tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 yang besarnya 79,32% dari total pengeluaran daerah, dan pengeluaran rutin terendah terjadi pada tahun anggaran 1997/1998 yang besarnya hanya 43,15% dari total pengeluaran daerah. Selama periode tersebut rata – rata pengeluaran rutin sebesar 57,2% dari total pengeluaran daerah. Pada sisi pengeluaran pembangunan pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1997/1998 yang besarnya 56,38% dari total pengeluaran daerah, dan pengeluaran terendah terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 yang besarnya 20,68% dari total pengeluaran pemerintah daerah. Selama periode tersebut rata - rata pengeluaran rutin sebesar 42,8% dari total pengeluaran pemerintah daerah. Sejak tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun anggaran 1999/2000 pengeluaran rutin lebih besar dari pengeluaran pembangunan,

bahkan pada tahun 1998/1999 dan 1999/2000 jumlah pengeluaran rutin mencapai 76,07% dan 79,32% yang besarnya mencapai 3 kali lipat lebih besar dari pengeluaran pembangunan yang hanya mencapai 23,93% dan 20,61% dari total pengeluaran daerah. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya desentralisasi pengeluaran rutin daerah khususnya pada pos belanja pegawai.

4.3 Penentuan Komponen Prioritas Pendapatan Daerah

Keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi merupakan persoalan sentral yang mampu berdampak luas terhadap bidang - bidang lainnya. Tingkat otonomi daerah dapat diketahui dengan melihat kemampuan aspek keuangan daerah yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, sebagai tolok ukur utama. Agenda optimalisasi pendapatan daerah penting maknanya guna menopang agenda otonomisasi daerah, meskipun otonomi daerah tidak semata – mata ditentukan oleh ketergantungan secara finansial akan tetapi dengan semakin besar kontribusi pendapatan daerah terhadap APBD menandakan bahwa pemerintah daerah semakin independen dari intervensi pusat.

Upaya – upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah pada akhirnya berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penentuan komponen prioritas pendapatan daerah merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas berbagai jenis pajak dan retribusi dalam rangka perbaikan iklim investasi yang lebih kondusif. Metode yang dapat digunakan adalah analisis Skalalogram (Skalling), metode ini dimaksudkan untuk menentukan skala prioritas melalui perengkingan terhadap komponen pendapatan daerah yang ada berdasarkan penerimaannya dan yang memiliki keunggulan dibandingkan komponen lainnya. Berdasarkan tabel 4 dapatlah dikatakan bahwa upaya eksploitasi penerimaan daerah yang ada masih belum

sepenuhnya optimal dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Proporsi sumbangan komponen pendapatan daerah yang ada masih cenderung fluktuatif tiap tahunnya oleh karena itu upaya – upaya intensifikasi masih perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada. Sumber pendapatan yang ideal adalah pendapatan yang selalu rutin mengalami kenaikan rutin dalam arti dapat diharapkan masuk dalam kas daerah .

Selama lima tahun anggaran, mulai tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000, penerimaan daerah kabupaten Kediri ditopang oleh komponen penerimaan yaitu pajak daerah, retribusi pasar, laba BUMD, penerimaan dinas – dinas, penerimaan lain – lain pendapatan daerah, pos bagi hasil pajak bukan pajak.

Komponen retribusi daerah terdiri dari 29(sub komponen) item, komponen pajak daerah terdiri dari 17 item, komponen penerimaan dinas – dinas terdiri dari 5 item, komponen penerimaan lain – lain pendapatan daerah terdiri dari 5 item, komponen laba BUMD terdiri dari 4 item, komponen bagi hasil pajak bukan pajak terdiri dari 10 item. Sebagaimana kebijakan pemerintah untuk memangkas pos – pos penerimaan pajak dan retribusi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan intensifikasi pendapatan daerah. Bentuk intensifikasi yang bisa dilakukan salah satunya adalah mengurangi/memangkas beberapa pos penerimaan yang ada dan lebih mengintensifkan pada beberapa pos penerimaan yang memiliki keunggulan dan prospek yang baik pada masa mendatang.

Data yang ada pada lampiran 2 - 7 dianalisis dengan menggunakan metode skalling untuk mengetahui skala prioritas melalui perengkingan terhadap komponen pendapatan daerah yang memiliki keunggulan berdasarkan penerimaannya dibanding komponen – komponen lainnya. Metode Skalling dirumuskan sebagai berikut:

$$NS = \frac{N_i - N_{\min}}{N_{\max} - N_{\min}} \times 100$$

Hasil dari analisis diatas (Lampiran 9), terpilih komponen prioritas pendapatan daerah di Kabupaten Kediri secara berturut – turut sebagai berikut : 1) bagi hasil pajak dan bukan pajak; 2) komponen penerimaan dinas – dinas; 3) komponen retribusi pajak; 4) komponen pajak daerah; 5) komponen penerimaan lain – lain; 6) komponen laba BUMD. Masing – masing komponen prioritas yang memiliki keunggulan atau potensi dibandingkan dengan komponen yang lain berdasarkan besarnya penerimaannya selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 ditunjukkan dengan hasil skalling yang mendekati angka 100, dimana semakin besar hasil skalling, maka semakin besar pula skala prioritasnya.

Pada komponen bagi hasil pajak bukan pajak terpilih dua sub komponen prioritas yaitu : 1) pajak bumi dan bangunan; 2) penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada komponen dinas – dinas terpilih dua sub komponen prioritas yaitu : 1) RSUD Pare; 2) dinas peternakan daerah. Pada komponen retribusi daerah terpilih lima sub komponen prioritas yaitu :1) retribusi pasar; 2) retribusi ijin bangunan; 3) retribusi kebersihan; 4) retribusi pendaftaran penduduk ktp/kk; 4) retribusi puskesmas dan balai pengobatan. Pada komponen pajak terpilih lima sub komponen prioritas secara berturut – turut sebagai berikut : 1) pajak penerangan jalan umum; 2) pajak pemanfaatan air bawah tanah; 3) pajak kendaraan tidak bermotor; 4) pajak reklame; 5) pajak pembangunan I. Pada komponen penerimaan lain – lain terpilih dua sub komponen prioritas yaitu : 1) penerimaan jasa giro dari bank pembangunan daerah; 2) hasil penjualan rupa – rupa. Pada komponen penerimaan laba perusahaan daerah terpilih dua sub komponen prioritas yaitu : 1) perusahaan daerah perkebunan margomulyo; 2) laba bank pasar.

Penerimaan dari komponen laba perusahaan daerah, penerimaan dinas – dinas, penerimaan lain – lain dan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya dipilih 2 item saja mengingat pada pos tersebut, hanya terdiri dari 4 – 8 item (sub komponen).

4.4 Pertumbuhan Rata – Rata Komponen Prioritas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

Upaya untuk lebih mempertegas keberadaan dan keunggulan komponen prioritas pendapatan daerah yang ada dilakukan dengan jalan menganalisis pertumbuhan rata – rata pertahun komponen prioritas yang terpilih dengan metode analisis rata – rata ukur (Dajan,1995 :154). Metode ini digunakan untuk melihat besarnya pertumbuhan komponen prioritas pendapatan daerah yang terpilih.

$$\text{LogGm} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Log}X_i}{n}$$

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh komponen Pendapatan yang ada, tidak menjamin pertumbuhan rata – rata dari komponen pendapatan tersebut juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan komponen yang lain, yang mempunyai kontribusi lebih rendah terhadap pendapatan daerah. Secara lebih rinci dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata – rata per tahun komponen prioritas yang terpilih cukup tinggi besarnya diatas 10%, kecuali pada komponen retribusi daerah sebesar 0,923%.

Pada sub komponen penerimaan pajak daerah pertumbuhan tertinggi pada sub komponen pajak penerangan jalan umum yaitu sebesar 25,17% dan pertumbuhan terendah dimiliki oleh sub komponen pajak reklame yaitu sebesar 4,89%. Pada sub komponen retribusi daerah pertumbuhan rata – rata tertinggi dimiliki oleh sub komponen retribusi pasar yaitu sebesar 12,91% dan pertumbuhan rata – rata terendah dimiliki oleh sub komponen retribusi pendaftaran penduduk KTP/KK sebesar 0,5988%.

Data dibawah ini (tabel 13) menunjukkan pertumbuhan rata – rata pertahun komponen dan sub komponen prioritas pendapatan daerah di Kabupaten Kediri tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tabel 13: Pertumbuhan Rata – Rata Pertahun Komponen Prioritas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kediri

No	Komponen Prioritas Pendapatan Daerah	Pertumbuhan rata – rata pertahun (%)
I.	Pajak Daerah	16,547%
1.	Pajak Penerangan Jalan Umum	25,17%
2.	Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah	13,68%
3.	Pajak Kendaraan Tidak bermotor	5,44%
4.	Pajak Reklame	4,49%
5.	Pajak Pembangunan I	7,106%
II.	Retribusi Daerah	0,923%
1.	Retribusi Pasar	12,915%
2.	Retribusi ijin bangunan	
3.	Retribusi Kebersihan	0,998%
4.	Retribusi Pendaftaran Penduduk /KTP/KK	0,599%
5.	Retribusi Puskesmas Dan Balai Pengobatan	0,997%
III.	Penerimaan Laba BUMD	11,815%
1.	Perusahaan Perkebunan Margomulyo	19,72%
2.	Lab Bank Pasar	0,99%
IV.	Penerimaan Dinas -Dinas	16,61%
1.	Rsud Pare	15,74%
2.	Dinas Peternakan	0,62%
V.	Penerimaan Lain -Lain	12,78%
1.	Penerimaan Jasa Giro Dari Bank Pembangunan Daerah	15,88%
2.	Hasil Penjualan Rupa – Rupa	33,35%
VI.	Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	21,48%
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	23,098%
2.	Pembagian Pajak Kendaraan Bermotor	0,987%

Sumber : Lampiran 9-39

4.5 Estimasi Pendapatan Daerah Dalam Mewujudkan Kemandirian Daerah

Otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembagian kekuasaan secara vertikal pada suatu negara, dengan otonomi kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. Kedua tingkatan pemerintahan tersebut dalam menjalankan tugasnya bertujuan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, oleh karena itu kemudian dilakukan pembagian tugas dan kewenangan pemerintah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pelayanan yang ada pada berbagai tingkatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan UU. No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali 5 bidang yaitu : Politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kekuasaan peradilan, kebijakan moneter, dan agama(sistem otonomi formil). Namun untuk daerah kota dan kabupaten kewenangan yang sifatnya wajib dilaksanakan adalah kewenangan yang sifatnya operasional.

Kewenangan yang bersifat wajib terutama meliputi kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat banyak yang bagaimanapun juga tidak bisa dielakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Kewenangan yang bersifat opsional tergantung pada kebutuhan dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Artinya harus ada prioritas utama dan prioritas alternatif, prioritas alternatif dapat diadakan manakala pemerintah daerah telah mampu membiayai prioritas utama.

Menurut ketentuan UU. No.22 tahun 1999 pada pasal 11 ayat 1, ada 11 bidang pemerintahan prioritas utama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota yaitu bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan pemerintahan sehari – hari setiap tahunnya selalu membutuhkan sejumlah dana tertentu untuk

Pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan pemerintahan sehari – hari setiap tahunnya selalu membutuhkan sejumlah dana tertentu untuk membiayai pengeluaran rutin kelembagaan pemerintah daerah sehari – hari. Kebutuhan pengeluaran rutin dinas/instansi /lembaga pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai (1) belanja pegawai;(2) belanja barang; (3) belanja pemeliharaan dan lain – lain.

Berdasarkan penelitian diperoleh data realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000 seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel : 14 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Pendapatan Daerah (ribuan)	Perkembangan
1995/1996	13.754.736,85	
1996/1997	19.465.226,57	41,52%
1997/1998	18.885.520,46	-2,98%
1998/1999	22.898.032,48	21,25 %
1999/2000	24.182.058,28	5,61%
Rata –rata		16,35%

Sumber: Lampiran 1 diolah

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000 cenderung mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 sebesar 41,52% dari tahun sebelumnya. Perkembangan terendah terjadi pada tahun anggaran 1997/1998, yaitu mengalami perkembangan negatif sebesar 2,98%. Selama periode tersebut rata – rata mengalami perkembangan sebesar 16,35%. Berdasarkan data pada tabel(14) di atas dilakukan estimasi terhadap pendapatan daerah kabupaten Kediri selama tahun anggaran 2000/2001- 2004/2005, dengan metode *trend least Square* dan hasilnya terlihat dalam tabel dibawah ini .

Tabel : 15 Perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004/2005

Tahun		Perkembangan
2000/2001	28.770.533,1410	
2001/2002	31.359.930,1706	9,00%
2002/2003	33.949.327,2002	8,26%
2003/2004	36.538.724,2298	7,63%
2004/2005	39.128.121,2594	7,09%
Rata- rata		7,995%

Sumber Lampiran 41

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap data - data pengeluaran rutin yang ada diperoleh pengeluaran rutin Kabupaten Kediri seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16: Perkembangan Pengeluaran Rutin Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Pengeluaran rutin (ribuan)	Perkembangan
1995/1996	13.333.788	
1996/1997	16.283.839	22,09%
1997/1998	20.216.442	24,15%
1998/1999	75.690.047	274,40%
1999/2000	113.097.021	49,42%
Rata –rata		92,51%

Sumber: BPS Kabupaten Kediri tahun 1995/1996 –1999/2000

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas dilakukan perhitungan dengan metode *trend least square* sehingga diperoleh perkiraan pengeluaran rutin kabupaten Kediri paling minimal pada tahun 2000/2001 – 2004/2005 seperti tabel dibawah ini

Tabel 17: Perkiraan Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Kediri Pada Tahun Anggaran 2000/2001 – 2004/2005.

Tahun	Pengeluaran rutin(ribuan)	Perkembangan
2000/2001	131.496.442,0090	
2001/2002	156.2808.81,0035	18,85%
2002/2003	181.065.319,9971	15,86%
2003/2004	205.849.758,9907	13,69%
2004/2005	230.634.197,9843	12,75%
Rata- rata		15,288 %

Sumber : Lampiran 40

Pada tahun 2000/2001 – 2004/2005 pengeluaran rutin diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2000/2001, pengeluaran rutin diperkirakan mencapai sekitar Rp. 131.496.442.009,00 dan terus meningkat sehingga pada tahun 2004/2005 akan menjadi Rp.230634.197.984,00.

Berdasarkan data pada tabel 14 dan data pada tabel 16 dapat diketahui indeks kemampuan rutin (IKR) Kabupaten Kediri pada tahun 1995/1996 – 2004/200.

Tabel 18 : Angka Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Kediri Tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000(ribuan)

Tahun	Pendapatan Daerah	Pengeluaran Rutin	IKR
1995/1996	13.754.736,85	13.337.788	103,13%
1996/1997	19.465.226.57	16.283.893	119,53%
1997/1998	18.885.520,460	20.216.442	93,42%
1998/1999	22.898.032,480	75.690.047	30,25%
1999/2000	24.182.058,280	113.097.021	21,38%
rata- rata			73,54%

Sumber: lampiran 8

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa angka IKR Kabupaten Kediri tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 masih bersifat fluktuatif dengan angka IKR terendah terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 21,38% dan tertinggi pada tahun anggaran 1996/1997 sebesar 119,53%, IKR rata – rata selama periode tersebut sebesar 73,54%.

Berdasarkan data pada tabel 15 dan dan data pada tabel 17 maka diketahui estimasi angka Indeks Kemampuan Daerah selama tahun anggaran 2000/2001 – 2004/2005.

Tabel 19: Perkiraan angka Indeks Kemampuan rutin Daerah Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2000/2001 – 2004/2005.(ribuan)

Tahun	Pendapatan daerah	Pengeluaran Rutin	IKR
2000/2001	28.770.533,1410	131.496.442,0090	21,88%
2001/2002	31.359.930,1706	156.280.881,0035	20,07%
2002/2003	33.949.327,2002	181.065.319,9971	18,75%
2003/2004	36.538724,2298	205.849.758,9907	17,75%
2004/2005	39.128.121,2594	230.634.197,9843	16,96%
rata –rata			19,08%

Sumber: lampiran 8

Berdasarkan tabel 19 diperkirakan angka indeks kemampuan rutin kabupaten Kediri akan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2000/2001 angka IKR diperkirakan mencapai 21,88%. Angka Indeks Kemampuan Rutin tersebut akan terus mengalami penurunan dan menjadi sebesar 16,96% pada tahun anggaran 2004/2005. Secara rata – rata selama tahun anggaran 2000/2001 – 2004/2005 angka indeks kemampuan rutin kabupaten Kediri diperkirakan mencapai 19,08%.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis tentang penentuan komponen prioritas pendapatan daerah Kabupaten Kediri maka didapat gambaran yang jelas. Komponen – komponen yang mana yang memungkinkan untuk dikembangkan serta lebih diintensifkan penggarapannya sehingga upaya optimalisasi pendapatan daerah benar – benar lebih efektif dan efisien dalam rangka menciptakan kemandirian keuangan daerah menuju otonomi daerah.

Beberapa persoalan yang patut dijadikan kajian ulang berkaitan dengan masalah pembangunan daerah adalah kejelasan tingkat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri serta penyerahan kewenangan keuangan sampai saat ini masih menjadi

persoalan yang belum tuntas dalam kerangka otonomi daerah. Implementasi UU No 22 dan 25 tahun 1999 ternyata selain membawa dampak positif, juga meninggalkan sejumlah permasalahan yang begitu rumit bagi pemerintah pusat maupun daerah, sehingga ada tekanan kuat untuk melakukan revisi undang – undang tersebut meskipun masih berlaku selama satu tahun. Hal – hal yang mengkhawatirkan dari pemberlakuan undang – undang ini antara lain : 1) pemerintah daerah telalu memikirkan peningkatan pendapatan daerahnya tanpa memperhitungkan daya tarik untuk investasi dan daya saing produk - produk industri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk-produk perda yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi(Suwandi,2001); 2) adanya kemungkinan konflik antar kabupaten/kota yang berdekatan dalam memperebutkan objek pajak atau retribusi(Down to earth Nr,2000); 3) egoisme dan kebanggaan daerah membuat pemerintah daerah ingin mengintervensi segala kebijakan yang menyangkut segala aktifitas ekonomi daerahnya(Dialog Ekonomi Politik CIDES – ICMI,2001); 4) resistensi daerah untuk menerima pengalihan pegawai pusat dapat mengancam APBN dan upaya menciptakan efisiensi publik, karena masalah transfer pegawai dari pusat pada daerah sebagian besar menyebabkan RAPBD lebih difokuskan pada pengeluaran rutin dibandingkan pembangunan sehingga upaya pembangunan akan sangat terbatas dan kualitas infrastruktur dasar mungkin akan terancam(Dialog Ekonomi Politik CIDES - ICMI,2001); 5) wewenang daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah tidak terkontrol oleh pemerintah pusat atau pemerintah propensi; 6) adanya kekhawatiran ancaman disintegrasi karena punya peluang untuk memunculkan raja – raja kecil di daerah; 7) bagi daerah yang tidak ada kesiapan terhadap pemberlakuan undang – undang ini justru menimbulkan malapetaka.

Kebijakan pemerintah memangkas berbagai jenis pajak dan retribusi daerah tidak lepas dari tarik - menarik antara kepentingan optimalisasi pendapatan daerah dan urgensi perbaikan iklim investasi, dimana optimalisasi pendapatan daerah memiliki makna yang penting guna menopang otonomisasi daerah. Disisi lain, investor membutuhkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan modalnya.

Optimalisasi pendapatan daerah sering kali dilakukan dengan cara – cara yang terlalu kreatif, sehingga menyebabkan tumpang tindih antara retribusi dan pungutan daerah dengan pajak yang ditetapkan dan menjadi hak milik pemerintah pusat. Padahal iklim investasi yang kondusif di daerah sangat penting maknanya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sentralisasi pembangunan sektoral selama beberapa dekade telah membuahakan struktur ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga pemerintah daerah cenderung tidak kreatif untuk mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada, karena proses pengambilan keputusan yang sentralistik ada kemungkinan untuk melemahkan validitas dalam perumusan masalah – masalah spesifik di daerah.

Berdasarkan pengalaman empirik, pola sentralisasi terbukti kurang valid untuk merumuskan problem solving bagi problem – problem di daerah yang kompleks lantaran memiliki karakter masing – masing. Mekanisme perencanaan yang berpola top – down planning seringkali tidak efektif, karena tidak memiliki relevansi yang erat dengan apa yang dibutuhkan masyarakat daerah. Diakui atau tidak pola top – down planning yang tidak relevan tersebut masih eksis dalam pola perencanaan yang diterapkan.

Pemberian otonomi tidak hanya sebatas kewenangan secara administratif akan tetapi juga kewenangan untuk mengurus dan membiayai pembangunan daerah masing – masing. Otonomi terasa masih ambivalen jika pengucuran dana subsidi dari pusat masih diboncengi instruksi – instruksi khusus yang cenderung menghambat kemandirian daerah dalam mengoptimalkan sumber daya di daerahnya. Disini nampak bahwa masalah optimalisasi pendapatan daerah merupakan hal yang urgen dan substansial dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang efektif bagi pembangunan daerah.

Pada tataran operasional, agenda optimalisasi pendapatan daerah terbentur setidaknya – tidaknya dua kendala mendasar yaitu :

1. Ketergantungan pendapatan daerah terhadap sumber - sumber fiskal atau pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya.

2. Adanya faktor eksogen yang menyebabkan *trade off* antara optimalisasi pendapatan daerah dan iklim investasi. Faktor eksogen tersebut menyangkut mentalitas dan kualitas birokrasi daerah.

Sebagian besar pendapatan daerah diperoleh dari pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya, padahal ekstensifikasi untuk sumber – sumber penerimaan daerah tersebut sudah tidak relevan. Hal ini disebabkan karena sumber – sumber penerimaan tersebut cenderung membebani masyarakat dan investor dengan pungutan – pungutan yang semakin beragam. Berdasarkan segi wibawa pemerintah dan produk kebijakannya, tumpang tindih antara retribusi dan pajak yang dipungut pemerintah pusat juga berdampak negatif, sebab mencerminkan inkonsistensi kebijakan sekaligus ketiadaan skema kebijakan yang komprehensif.

Pada masa mendatang, kreatifitas Pemda dalam menggali pendapatan daerah tidak indentik dengan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam APBD. Aset pemerintah daerah lain yang bisa dikembangkan seperti BUMD selama ini masih kurang optimal dalam menghasilkan laba. Untuk itu masih sangat dimungkinkan untuk diprofesionalkan. Peningkatan efisiensi dalam kinerja BUMD akan dapat meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pembangunan wilayahnya.

Kerjasama pengelolaan BUMD dengan pihak swasta juga merupakan lapangan lain yang belum banyak tersentuh. Paket deregulasi penanaman modal Asing (PMA) melalui PP NO.20/1994 yang membuka peluang penanaman modal bagi investor asing. Berbagai lapangan usaha dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak swasta dan pihak asing.

Kabupaten Kediri dengan segenap potensi baik secara geografis maupun ekonomis yang dimiliki saat ini sangat memungkinkan sekali untuk melakukan upaya – upaya optimalisasi pendapatan daerah dengan mengembangkan agenda – agenda tersebut diatas tanpa harus membebani masyarakat dengan pungutan – pungutan yang ada. Penentuan komponen prioritas pendapatan daerah dapatlah dilakukan dalam

rangka menciptakan iklim dan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Kabupaten Kediri dimasa yang akan datang.

Tingkat kemandirian daerah kabupaten Kediri pada tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 boleh dikatakan cukup tinggi (diatas 50%). Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Kediri rata – rata pertahun selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 sebesar 73,54%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran rutinnya dengan pendapatan daerah yang dimiliki secara rata – rata mencapai sebesar 73,54% dari seluruh pengeluaran rutinnya dengan pendapatan daerah yang dimilikinya. Berdasarkan hasil estimasi terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kediri, ternyata pendapatan daerah dikabupaten kediri belum mampu mewujudkan kemandirian daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil estimasi tingkat kemandirian daerah pada tahun anggaran 2000/2001 – 2004/2005 yang mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh semakin banyaknya urusan dari pemerintah pusat yang diserahkan pada daerah yang tidak didukung oleh aspek pembiayaan.

Pada tahun anggaran 2000 /2001 angka indeks kemampuan rutin diperkirakan mencapai sebesar 21,88%. Angka indeks kemampuan rutin tersebut diperkirakan akan terus mengalami penurunan menjadi 16,96% pada tahun 2004/2005. Angka indeks kemampuan rutin tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah kabupaten kediri dalam membiayai pengeluaran rutin daerahnya dengan pendapatan daerah yang dimilikinya relatif kecil, secara rata – rata IKRnya hanya 19,08%, artinya selama periode tersebut tingkat kemampuan daerah kabupaten Kediri dalam membiayai pengeluaran rutinnya secara rata - rata sebesar 19,08% dari seluruh pengeluaran rutin dengan pendapatan daerah yang dimilikinya. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan dengan uji t dan uji F diperoleh bahwa nilai t hitung dan F hitung lebih besar dari t tabel dan F tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengganggu terdistribusi secara normal dan anggapan normalitas dapat dipenuhi. Apabila anggapan normalitas terpenuhi maka penaksir yang BLU dapat

dipenuhi, sehingga nilai estimasi dari pendapatan dan pengeluaran daerah yang diperoleh kecil tingkat kesalahannya atau dapat dipertanggung jawabkan. Nilai t hitung dan F hitung untuk pendapatan daerah sebesar 9,262 dan 85,777 sedangkan besarnya t tabel dan F tabel sebesar 1,734 dan 8,28. Nilai t hitung dan F hitung untuk pengeluaran rutin sebesar 7,770 dan 60,372 sedangkan besarnya t tabel dan F tabel sebesar 1,734 dan 8,28.

Kecilnya tingkat kemandirian daerah tersebut lebih disebabkan karena sekalipun pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi peningkatan pendapatan daerah yang terjadi belum mampu mengimbangi peningkatan pengeluaran rutinnya.

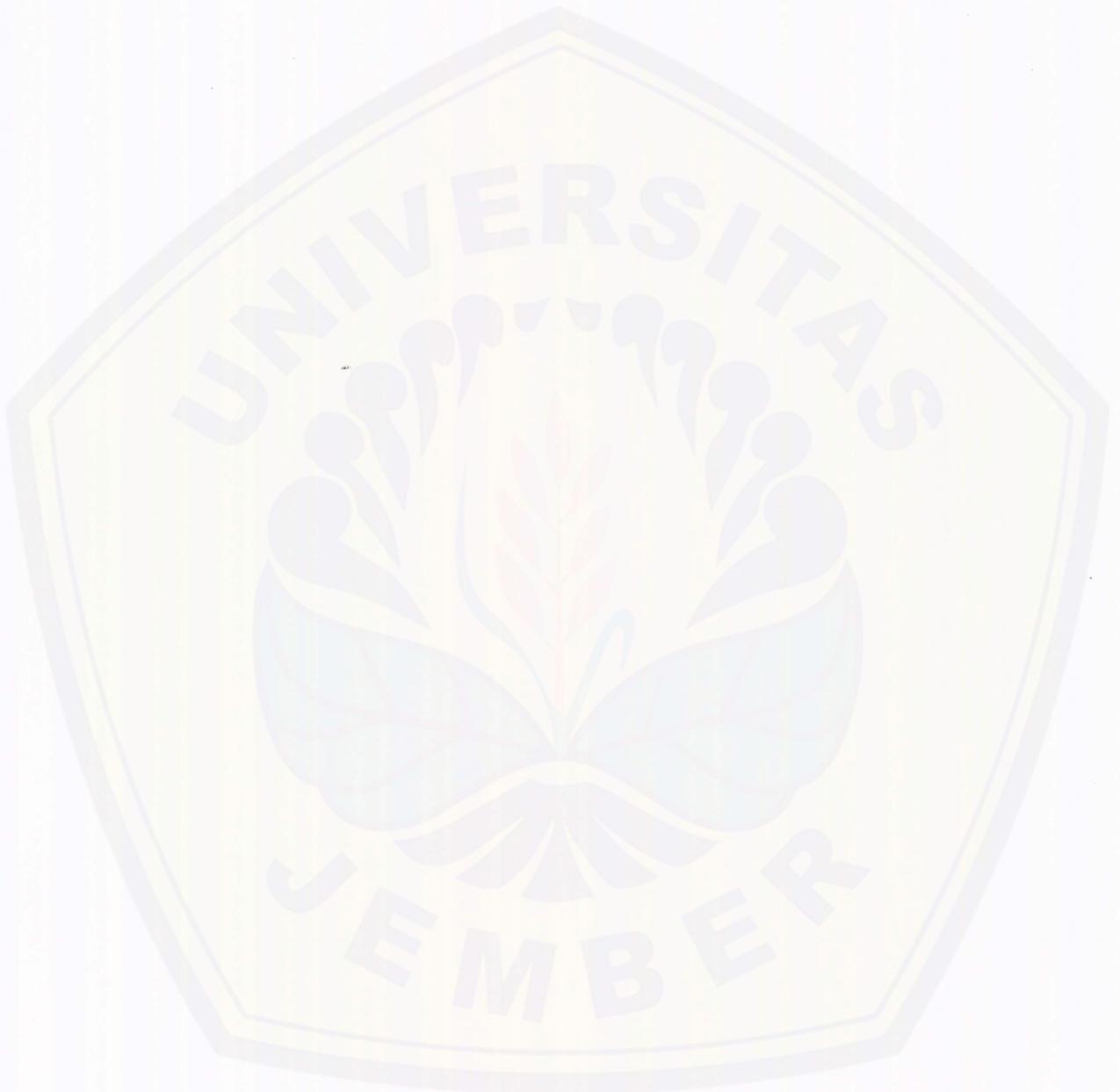
Tingkat kemandirian daerah yang rendah tersebut menyebabkan munculnya kekhawatiran akan kesiapan Kabupaten Kediri dalam menjalani era otonomi daerah secara finansial. Apabila asumsi yang digunakan adalah setiap daerah harus mampu membiayai seluruh pengeluaran rutinnya secara mandiri, tentunya sangat riskan bagi kabupaten atau kota untuk mampu mempertahankan eksistensinya pada era otonomi daerah. Kondisi yang demikian mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Kediri berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, agar mampu membiayai seluruh pengeluaran rutinnya dengan pendapatan daerah yang dimilikinya.

Rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin daerah akan menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah kurang dapat berjalan dengan baik, sehingga pemerintah daerah harus bekerja keras untuk melakukan upaya meningkatkan pendapatan daerah, agar pemerintah daerah menjadi mandiri.

Pemerintah daerah Kabupaten Kediri mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerahnya mengingat :

1. Upaya penggalan pendapatan daerah yang dilakukan masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari rasio pendapatan daerah dengan PDRB yang hanya mencapai 1,4% , sebagai bahan pertimbangan, rasio pendapatan daerah terhadap PDRB dinegara maju – maju sebesar 30 % -50% (Musgrave ,1993:113).

2. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh kabupaten Kediri dari hasil perkebunan, kehutanan, dan pertanian yang besar.





V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian data hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis Skalalogram (Skalling) untuk menentukan komponen prioritas pendapatan daerah melalui perengkingan komponen pendapatan daerah dipilih komponen pendapatan yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya, serta memungkinkan untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri secara berturut – turut sebagai berikut: 1) komponen bagi hasil pajak dan bukan pajak; 2) komponen penerimaan dinas – dinas; 3) komponen retribusi; 4) komponen pajak daerah; 5) komponen penerimaan lain- lain; 6) komponen laba BUMD.
2. Pertumbuhan rata – rata komponen prioritas pendapatan daerah yang terpilih di Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 cukup tinggi, dengan pertumbuhan masing – masing komponen diatas 10%, kecuali komponen retribusi daerah, yang besarnya hanya 0,923%
3. Tingkat Kemandirian daerah Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 cukup tinggi (didas 50%) rata-rata sebesar 73,54%. Berdasarkan hasil estimasi pendapatan daerah di Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2000/2001 – 2004/2005, ternyata pendapatan daerahnya belum mampu mewujudkan kemandirian daerah, bahkan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan.

5.2 Saran

Agar penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kediri lebih optimal dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, guna melaksanakan otonomi daerah, maka perlu adanya beberapa tindak lanjut antara lain:

1. mengenali dengan baik potensi daerah sendiri dan menggalang kemampuan untuk meguak potensi – potensi tersebut, dengan mengidentifikasi aneka potensi lewat *base line survey* misalnya daerah memiliki suatu gambaran yang menyeluruh tentang pendapatan asli daerah sendirinya mana yang sudah jenuh dan mana yang masih bisa dikembangkan dan dari situ bisa ditetapkan target yang lebih realistis dan dinamis, tidak lagi monoton seperti yang umumnya dijumpai dikebanyakan daerah;
2. menitikberatkan kepada sumber – sumber penerimaan yang berdasarkan skala prioritas tersebut diatas, bahkan kalau perlu menghapuskan beberapa jenis pajak /pungutan yang sudah kurang/ tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, khususnya pola konsumsi masyarakat dan sifat – sifat objek pajaknya dan mencoba menghidupkan beberapa jenis pajak yang dihapus telah dihapus berdasarkan UU.No 17 tahun 1997 seperti pajak pembangunan I dan pajak kendaraan tidak bermotor karena cukup potensial di Kabupaten Kediri.
3. menetapkan kebijakan harga yang mampu menopang pencapaian optimalisasi kapasitas produksi, untuk itu jajaran aparat daerah yang mengelola BUMD dibidang *publik utility* harus benar – benar mampu memahami prinsip – prinsip ekonomi. Hal itu tidak berarti bahwa asas pemerataan dan keadilan harus dilanggar, yang kerap terjadi adalah misi sosial yang diemban BUMD menjadi temeng bagi ketidak efisienan
4. memperhitungkan segala sesuatunya dari tinjauan yang lebih makrosopis. Pengenaan suatu objek pajak atau bentuk – bentuk pungutan lainnya hendaknya tidak semata – mata dilihat sebagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan jenis pajak tertentu tersebut, melainkan perlu pula memperhitungkan dampaknya kepada pos – pos penerimaan yang lain dan kepada perekonomian daerah secara keseluruhan;

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Yohanes. 1998. *Elastisitas Alokasi Belanja Daerah Tingkat II*. Jurnal Manajemen Pembangunan . No.22/VI/1998
- Anwar, M Arsyad dan Faisal Basri Ed. 1990. *Bunga Rampai Konsep Ekonomi*. Jakarta : LP3ES
- Basri, Faisal. H. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Jakarta: Erlangga
- Budiharsono, S. 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PAU-Ekonomi UI
- CIDES, Tim. 2001. *Ketidakjelasan Arah dan Kebijakan Megawati terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. CIDES. <http://www.CIDES.or.id/text/P0018.asp>
- CIDES, Tim. 2001. *Agenda Jangka Menengah : Sukses Otonomi Daerah dan Membangun Daya Saing Nasional*. CIDES. <http://www.CIDES.or.id/text/artha.0004.asp>
- Charis, Abdhul. 1995. *Pemilihan Prioritas Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan Sumbangan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik tahun 1990/1991 sampai 1994/1995*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Jember. FE UNEJ
- Dajan, Anto. 1995. *Pengantar Statistik Jilid I*. Jakarta: LP3ES
- Davey, KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta : UI Perss
- Departemen Dalam Negeri. 1999. *UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: Kuriko Pratama Devas, Nick Dkk. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Dialog Ekonomi Politik CIDES – ICMI. 2001. *Otonomi Daerah dan Pemulihan Krisis Ekonomi*. CIDES. <http://www.CIDES.or.id/Publikasi/P0002.asp>
- Donw to Earth Nr, 2000. *Otonomi Daerah, Masyarakat, dan Sumber Daya Alam*. <http://www.ga.apc.org/dte/46ika.html>
- Esmara, Hendara. 1986. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Kansil, Ct. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kaho, Josep Riwu. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali

- Koswara,E. 2000.a *Makna Otonomi Daerah bagi Negara Kepulauan Seperti Indonesia dan Prospeknya dalam abad 21*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Edisi 10
- Mamesah,1995.*Sistem Administrasi Keuangan Daerah*.Jakarta:Gramedia Pusaka Utama.
- Musgrave,Richard dan Peggy. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga
- Nawawi,Hadari.H.1998 . *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:UGM Pe rss
- Nazara,S.1997. *Struktur Penerimaan Daerah Tingkat Propensi di Indonesia*. dalam Prisma NO.3 Th XXVI Maret. Jakarta
- Nurjaman,A dkk.1992.*Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia
- Otonomi Daerah*. Info@Indonesian Marketlinks.net
- Otonomi Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <http://www.Bappedal.go.id/dialog/isi/otda/html>
- Prosiding.1999.*Dampak UU Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Terhadap Sektor Rill dan Pemerataan Pembangunan Daerah* . Jakarta : USAID – BAK M Depkue.
- Ramses,Andy. 2000. *Format Baru Otonomi Daerah (Makna dan Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*. Jurnal Imu Pemerintahan . Edisi 11
- Rodianto,E.1997. *Otonomi Keuangan Daerah tingkat II Studi di Maluku*. Prisma NO.3 Th XXVI Maret. Jakarta
- Samego, Indria.2001. *Otonomi Daerah dalam Prespektif Politik*.CIDES. <http://www.CIDES.or.id/Publikasi/P0002.asp>
- Soetrisno PH. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta:BPFE UGM
- Subagyo,Pangestu. 1991. *Forecasting Konsep dan Aplikasinya*.Yogyakarta:BPFE UGM
- Suparmoko.1999. *Keuangan Negara*. Yogyakarta :BPFE UGM
- Suwandi,Rini.2001. Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkatkan Ekonomi Biaya Tinggi. [http:// www.Kompas.Com/Kompas.Com/or.og/02/pela.02/html](http://www.Kompas.Com/Kompas.Com/or.og/02/pela.02/html)
- Suwitaningsih,Lujeng.1993. *Potensi dan Pengembangan keuangan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi..* Skripsi tidak terpublikasikan. Jember.Fakultas Ekonomi . Universitas Jember
- Tjokroamidjojo, Bintoro.1991. *Pengantar Administrasi Negara*. Surabaya: Erlangga

Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 1995/1996 – 1999/2000
dalam Ribuan (Rp.000)

	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
Pendapatan Daerah	1.941.546,493	2.205.005,337	1.262.413,925	3.076.757,008	3.584.064,031
Pajak Daerah	3.002.787,694	4.421.103,317	3.297.384,801	1.947.512,371	2.176.553,48
Retribusi	105.470,644	93.723,198	156.103,803	264.478,004	164.991,961
Laba BUMD	1.880.055,615	2.407.505,139	3.594.054,991	4.333.899,275	3.472.745,394
Dinas- Dinas	118.419,689	182.231,114	220.099,777	206.276,365	191.671,469
Penerimaan Lain- Lain	6.706.465,717	10.255.658,464	10.365.463,16	13.069.109,380	14.592.031,948
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	13.754.736,85	19.465.226,57	18.885.520,46	22.898.032,48	24.182.058,28
Total					

Lampiran 2 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 dalam Ribuan (Rp.000)

Pajak Daerah	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	Total
Potong Hewan	40.018,15	36.001,9	38.469			114.489,4
Pembangunan I	50.369,425	55.606,325	43.834,25			149.810
Pajak Radio I	14.346,5	17.464,3	34.569			66.379,8
Bangsa asing	1.405	55	6.745,5			8.205,5
Pajak pertunjukan	20.981,33	20.000,55	25.449,525			66.431,405
Pajak Reklame	50.900,145	55.963,3	46.287,115	54.259,17	65.862,106	273.271,836
Pajak Anjing	1.305,5	1.301	1.200			3.806,5
Minuman beralkohol	367,5	367,5	367,5			1.102,5
Pajak Kendaraan tidak bermotor	110.075,9	119.154,9	107.111,7			336.342,5
Pajak penerangan Jalan umum	1.649.775,043	1.797.090,062	953.649,335	1.981.623,126	2.332.761,872	8.714.899,438
pajak perusahaan	2.002	2.000,5	4.731			8.733,5
kandang babi						
pajak hotel dan restoran				58.484,449	62.708,815	121.193,314
Pajak hiburan				15.105,5	15.221	30.326,5
Pajak pengambilan pasir, batu dan krikil				55.203,703	84.378,034	139.581,737
Penerimaan pembagian iuran air bawah tanah lain – lain pajak				900.000,050	1.023.132,204	1.923.132,255
Total	1.941.546,493	2.105.005,337	1.262.413,925	3.076.757,088	3.584.064,031	11.969.786,874

Lampiran 3 : Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 1995/1996 – 1999/2000(ribuan)

Retribusi Daerah	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
Uang Leges	20.396	22.142,75	20.398		
Dispensasi	333.612,39	365.309	333.612,39		
Jalan/jembatan uang Penambangan	17.696	16.331	17.696		
Ijin Bangunan	190.317,122	1688.071,425	190.317,122	90.060,285	125.091,67
Pemeriksaan	25.001	16.331	17.696		
pembantaian					
Pengujian	601,5	768,5	764		
Kendaraan tidak bermotor					
Retribusi	74.224,1	97.714,4	90.500,6	83.680	95.702,1
Terminal&stasiun					
Puskesmas dan balai pengobatan	234.151.796	271.121,145	262.163,945	270.222,408	230.865,059
Tempat rekreasi dan olahraga	15.417,15	23.464,65	25.888,2	27.589,4	46.605,6
Retribusi Pasar	641.092,078	714.114,511	709.431,16	864.488,375	1.042.464,091
Kartu ternak	53.441,25	52.415,5	55.000,5		
Timbang ternak	25.124.477	26.204,831	29.164,017		
Rumah Bola	850	760	480		
Pemberian Ijin Usaha	21.775	26.158	20.595		
Sewa Ambulan	590,61	906,15	477,8		
uang Jasa 10% dari karcis titipan sepeda	4.329,31	4.533,43	4.526,75		
Penggilingan Padi	17.093	15.000,5	16.000		
Pengiriman ternak keluar daerah	7.202,5	8.002,5	6.000,5		
Pemberian ijin usaha angkutan	15.000	15.080	15.035	5.748	5.805
Pemberian ijin perusahaan bengkel kendaraan bermotor umum	120	205	230		
Pemakaian kekayaan daerah	236.118,8	232.483,8	245.835,003	236.963,06	254.637,245
Gambar bestek dan lain –lain pekerjaan inpres	16.335	25.480	45.386		
Pendaftaran penduduk KTP/KK	494.074,005	237256,525	538.654,625	53.228	63.567
Retribusi IPAIR	32.653,2	13.321,17	16.993,198		
Retribusi Parkir	50.481,678	56.081,8	73.897,775	69.767,6	100.382,4
Retribusi	475.089,728	491.845,73	560.623,216	194.885,79	164.201,315
Kebersihan					
Penyebrangan				19.823	25.554
diatas air					
ijin gangguan				5.602	21.678
lain-lain				25.418,453	
Total	3.002.787,874	4.421.103,317	3.297.384,801	1.947.512,371	2.176.533,48

Lampiran 4 : Realisasi Penerimaan Laba BUMD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 - 1999/2000 dalam Ribuan (Rp.000)

Penerimaan BUMD	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	Total
Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim)						
Perusahaan Daerah Canda	11.632,75	12.963,494	16.396,9	25.659.699	19.851,807	86.504,651
Bhirawa						
Laba Bank Pasar	43.837,894	45.479,454	45.628,706	37.210,335	42.450,154	214.606,544
Laba Perkebunan Margo	50.000	35.280,250	60.149,7	201.608	102.690	449.727,95
Mulyo						
Total	105.470,644	93.723,199	156.103,803	264.478.004	164.991,961	164.991,9611

Lampiran 5 : Realisasi Penerimaan lain – lain Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 dalam Ribuan (Rp.000)

	1995/1996	1996/1996	1997/1998	1998/1999	1999/2000	Total
Penerimaan lain - lain						
Penerimaan lain –lain	9.506,892	27.471,072	14.740,433	14.723.646	18.016,408	84.458,451
Penerimaan Jasa Giro dr	84.543,967	119.637,387	142.316,110	183.727,719	152.292,561	682.517,746
Bank pembangunan Daerah						
Hasil Penjualan rupa – rupa Barang Milik Daerah	15.400	15.037,5	26.467,5	7.825	21.362,5	86.092,5
Deviden dari hasil saham Bank Pembangunan Daerah	8.968.830	13.185,155	26.575,734			48.295,7
Ganti rugi kendaraan yang dihapus		6.900				6.900
Total	118.419,689	182.231,114	210.099,777	206.276,365	191.671,469	908.698,414

Lampiran 6 : Realisasi Penerimaan Dinas – Dinas Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 dalam Ribuan (Rp.000)

Dinas – Dinas	1995/1996	1996/19997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	Total
Rumah Sakit Umum	1.857.333,615	2.375.606,139	3.507.810,191	4.311.941,775	3.334.572,894	15.387.264,61
Daerah Pare	1.750	2.296	2.600	3.322,4	4000	13.968,4
Dinas Perikanan	17.222	19.003	70.899,1	2.560,1	114.772,5	224.456,7
Dinas Peternakan	2.000	8.300	9.745,7	12.550	15.700	48.295,7
Tanaman Pangan						
Daerah	1.750	2.300	3.000	3.525	3.700	14.275
Dinas Perkebunan						
TOTAL	1.880.055,615	2.407.505,139	3.594.054,991	4.333.899,275	3.472.745,394	

Lampiran 7 :Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Kabupaten Kediri Tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000
dalam Ribuan (Rp. 000)

	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
Bagi Hasil Pajak & Bukan pajak					
Pajak Bumi Dan Bangunan	5.111.343,969	8.232.619,016	8.414.845,654	11.009.314,606	11.746.352,774
Pembagian Pajak Kendaraan bermotor	1.265.172,250	996.749,571	1.114.090,386	1.215.118,503	
Iuran hasil hutan	34.005,175	33.243,583	28.382,638	32.318,139	51.610,657
Pembagian Air bawah tanah	192.046,53	913.528,364	650.479,087		
Hak atas tanah pemerintah	9.446,37	14.263,565	37.641,381	10.070,48	12.473,538
Pembagian Pendaftaran TV	20.468				
Pembagian Pengambilan Pasir, batu dan kerikil	73.983,423	65.254,356	81.222,623		
Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh			38.801,400		
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan				125.412,93	318.265,628
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				676.874,722	2.463.329,351
Total	6.706.465,717	10.255.658,464	10.365.463,16	13.069.109,380	14.592.031,948

Lamiran 8 : Hasil Perhitungan Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Kediri
Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –2004/2005 Dalam Data Kwartalan

N0	Pendapatan daerah	Pengeluaran Rutin	IKR
1	13855.606,2506	-11261926,5933	-123,031
2	14502955,5080	-5065816,8449	-286,291
3	15150304,7654	1130292,9035	1340,387
4	15797654,0228	7326402,6519	215,6263
5	16445003,2802	13522512,4003	121,612
6	17092352,5376	19718622,1487	86,68127
7	17739701,7950	25914731,8971	68,45412
8	18387051,0524	32110841,6455	57,26119
9	19034400,3098	38306951,3939	49,68915
10	19681749,5672	44503061,1423	44,22561
11	20354992,7948	50947015,2807	39,95326
12	21002342,0522	57143125,0291	36,75393
13	21649691,3096	63339234,7775	34,18054
14	22297040,5670	69535344,5259	32,06577
15	22944389,8244	75731454,2743	30,29704
16	23591739,0818	81927564,0227	28,79585
17	24239088,3392	88123673,7711	27,50576
18	24886437,5966	94319783,5195	26,38517
19	25533786,540	100515893,2679	25,40274
20	26181136,1114	106712003,0163	24,53439
21	26828485,3688	112908112,7647	23,76134
22	27475834,6262	119104222,5131	23,06873
23	28123183,8836	125300332,2615	22,44462
24	28770533,1410	131496442,0099	21,87932
25	29417882,3984	137692551,7583	21,3649
26	30065231,6558	143888661,5067	20,89479
27	30712580,9132	150084771,2551	20,46349
28	31359930,1706	156280881,0035	20,06639
29	32007279,4280	162476990,7519	19,69958
30	32654628,6854	168673100,5003	19,35971
31	33301977,9428	174869210,2487	19,04393
32	33949327,2002	181065319,9971	18,74977
33	34596676,4576	187261429,7455	18,47507
34	35244025,7150	193457539,4939	18,21796
35	35891374,9724	199653649,2423	17,97682
36	36538724,2298	205849758,9907	17,75019
37	37186073,4872	212045868,7391	17,53681
38	37833422,7446	218241978,4875	17,33554
39	38480772,0020	224438088,2359	17,14538
40	39128121,2594	230634197,9843	16,96545

Lampiran 9 : Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995 -1996

Komponen Pendapatan Daerah	Total Penerimaan (ribuan)	Nilai Skalling
Pajak Daerah	11.969.786,874	21,77
Retribusi Daerah	14.684.484,413	26,70
Laba Bumd	164.991,61	0,00
Penerimaan Lain-Lain	908.698,414	1,65
Penerimaan Dinas- Dinas	15.688.260,41	28,53
Bagi Hasil Pajak Bukanpajak	54.988.728,669	100,00

Lampiran 10 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata- Rata /Tahun Komponen Pajak Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Penerimaan Komponen Pajak Daerah (ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	1.941.546,493			
1996/1997	2.105.005,337	163.458,844	108,42	2,035
1997/1998	1.262.413,925	-842.591,412	59,97	1,778
1998/1999	3.076.757,088	1814.343,163	243,72	2,387
1999/2000	3.584.064,031	507.306,943	116,49	2,066
Total				8,266

$$\sum \log Xi = 8,226$$

$$\log Gm = \frac{8,226}{4} = 2,0665$$

$$Gm \text{ antilog } 2,0665 = 116,5467 \\ = 16,55\%$$

Lampiran 11 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata/Tahun Komponen Retribusi Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Penerimaan Retribusi(ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	2.949.346,444			
1996/1997	4.368.687,817	1.419.341,373	148,12	2,17
1997/1998	3.242.384,301	-1.126.303,516	74,22	1,87
1998/1999	1.947.512,371	-1.294.871,930	60,06	1,78
1999/2000	2.176.553,480	229.041,109	111,76	2,05
Total				7,87

$$\sum \text{Log Xi} = 7,87$$

$$\text{Log Gm} = \frac{7,87}{4} = 1,965$$

$$\text{Gm antilog } 1,965 = 92,257 \\ = 0,923\%$$

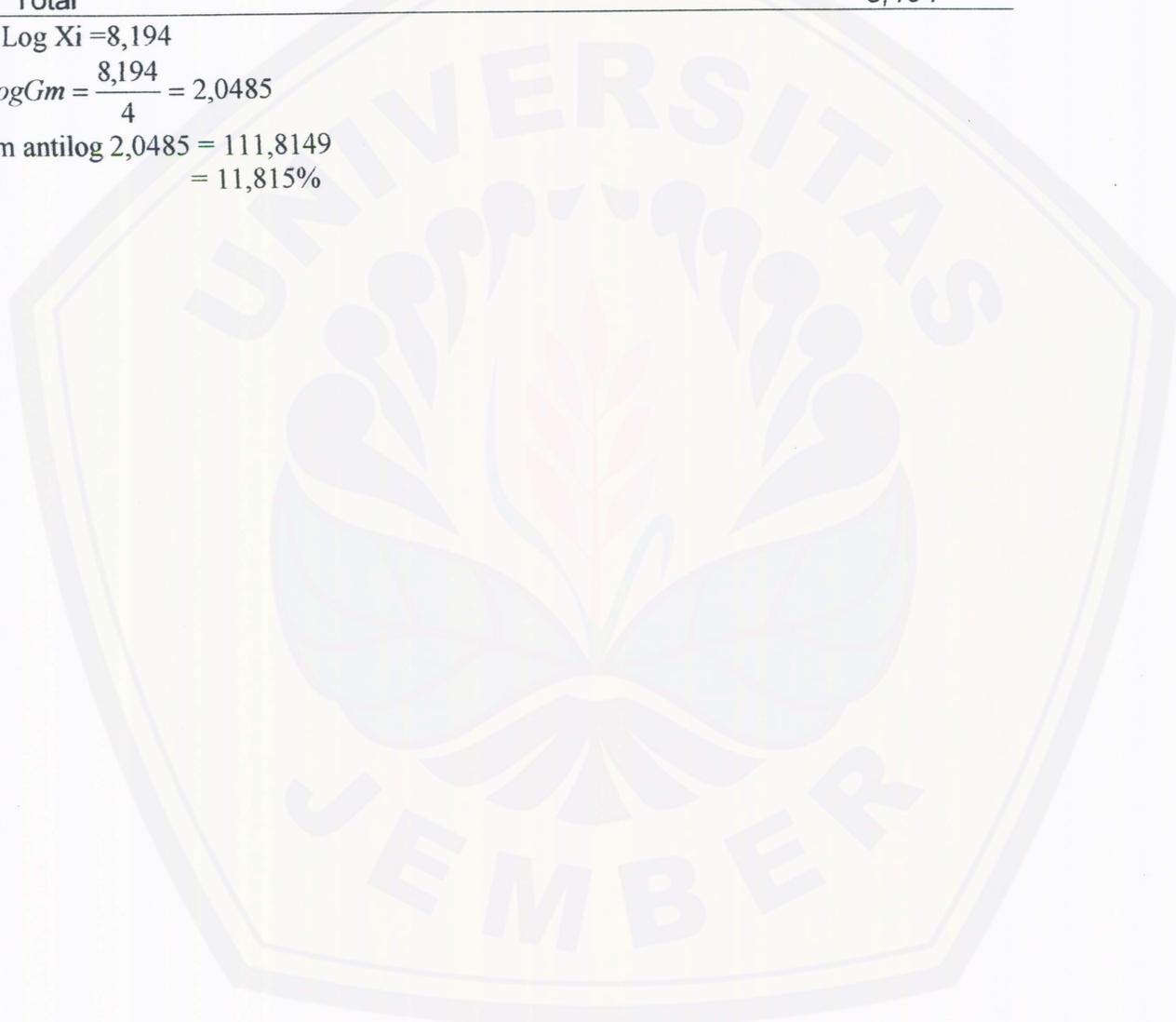
Lampiran 12 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan rata – rata/Per tahun Komponen Laba BUMD Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Penerimaan Laba BUMD (ribuan)	di	Xi	logXi
1995/1996	105.461,644			
1996/1997	93.723,198	-11.738,446	87,7	1,948
1997/1998	156.103,803	62.380,605	166,56	2,222
1998/1999	264.478,004	108.374,201	169,42	2,229
1999/2000	164.991,961	-99.486,043	62,38	1,795
Total				8,194

$$\sum \text{Log Xi} = 8,194$$

$$\text{LogGm} = \frac{8,194}{4} = 2,0485$$

$$\text{Gm antilog } 2,0485 = 111,8149 \\ = 11,815\%$$



Lampiran13 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata- Rata/ Pertahun Komponen
Penerimaan Lain – Lain Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran
1995/1996–1999/2000

Tahun	Penerimaan Komponen Penerimaan lain – Lain (ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	118.419,689			
1996/1997	182.231,114	63.811,425	153,886	2,187
1997/1998	210.099,777	27.868,663	115,293	2,062
1998/1999	206.276,365	-3.823,412	98,180	1,992
1999/2000	191.671,469	-14.604,896	92,919	1,968
Total				8,209

$$\Sigma \text{Log Xi} = 8,209$$

$$\text{LogGm} = \frac{8,209}{4} = 2,052$$

$$\text{Gm antilog } 2,052 = 112,78 \\ = 12,78\%$$

Lampiran 14 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata Pertahun Komponen Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000

Tahun	Penerimaan Komponen Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak(ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	6.706.465,717			
1996/1997	10.255.658,464	3.549.192,747	152,921	2,184
1997/1998	10.365.463,16	109.804,696	101,070	2,005
1998/ 1999	13.069.109,380	2.703.646,220	126,083	2,101
1999/2000	14.592.031,948	1.522.922,568	111,653	2,048
Total				8,338

$$\sum \text{Log Xi} = 8,338$$

$$\text{Log Gm} = \frac{8,338}{4} = 2,0845$$

$$\text{Gm antilog } 2,0845 = 121,479 \\ = 21,48\%$$

Lampiran 15: Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata/ Tahun Komponen
Penerimaan Dinas – Dinas Kabupaten Kediri Selama Tahun anggaran
1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Penerimaan Komponen Dinas - Dinas	di	Xi	logXi
1995/1996	1.880.055,615			
1996/1997	2.407.505,139	527.449,524	128,055	2,107
1997/1998	3.594.054,991	1.186.549,852	149,285	2,174
1998/1999	4.333.899,275	739.844,284	120,585	2,081
1999/2000	3.472.745,394	-861153,881	80,129	1,904
				8,266

$$\sum \text{Log Xi} = 8,266$$

$$\text{Log Gm} = \frac{8,266}{4} = 2,067$$

$$\text{Gm antilog } 2,067 = 116,61 \\ = 16,61\%$$

Lampiran : 16 Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Kediri Tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000

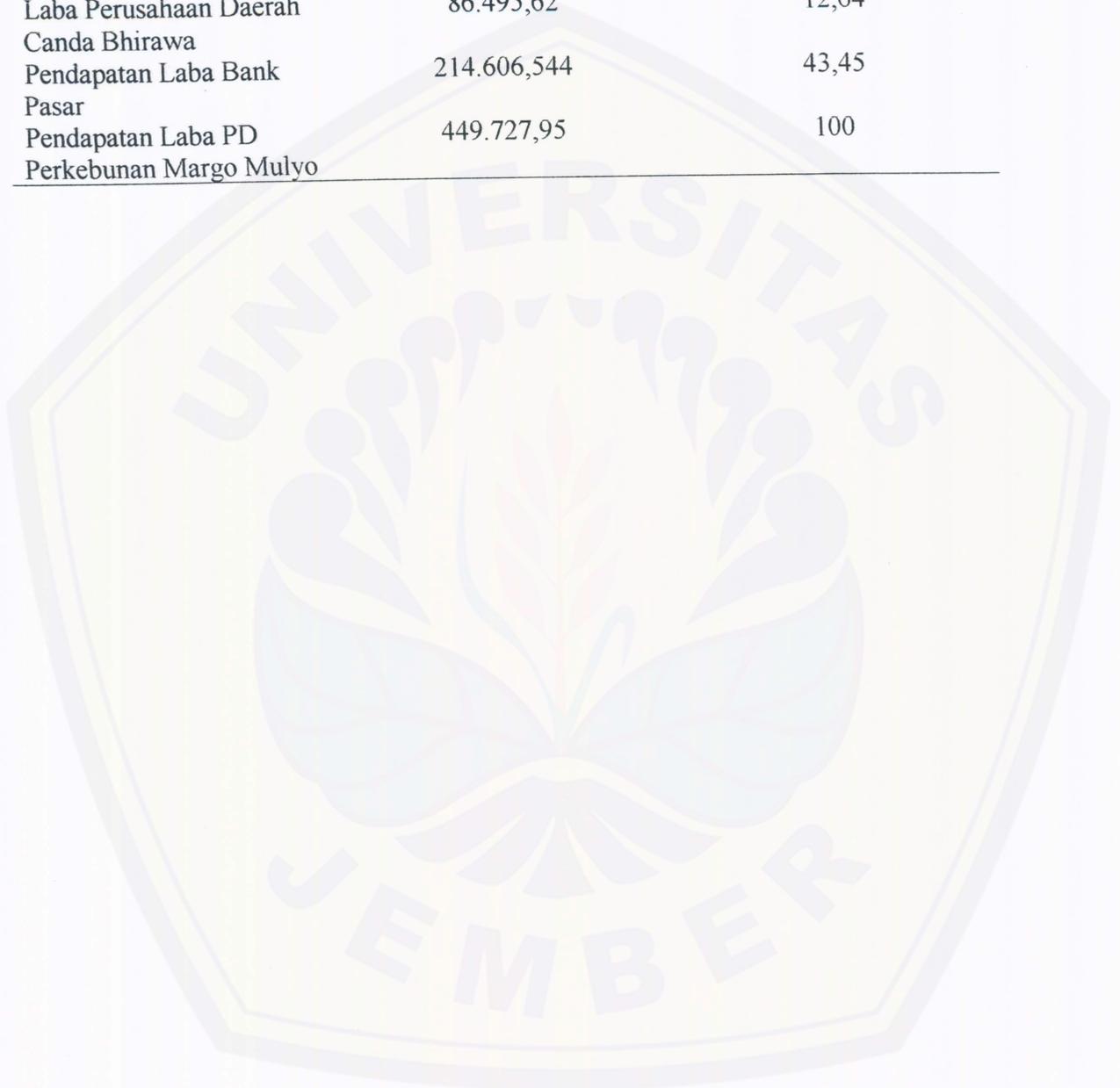
Pajak Daerah	Total Penerimaan (Ribuan)	Nilai Skalling
Pajak Potong Hewan	114.489,4	1,301
Pajak Pembangunan I	149.810	1,706
Pajak Radio	66.379,8	0,749
Pajak Bangsa Asing	8.205,5	0,000815
Pajak Pertunjukan	66.431,405	0,749
Pajak reklame	273.271,836	3,123
Pajak Anjing	3.806,5	0,031
Pajak Minuman Berakhol	1.102,5	0
Pajak Kendaraan tidak bermotor	336.342,5	3,847
Pajak Penerangan Jalan umum	8.714.899,438	100
Pajak Pengusahaan Kandang Babi	8.733,5	0,0875
Pajak Hotel dan Restoran	121.193,264	1,378
Pajak Hiburan	30.326,5	0,0033
Pajak Pengambilan Tambang golongan C	139.581,737	1,589
Penerimaan Pembagian Iuran air bawah tanah	1.923.132,255	22,057
lain-lain Pajak	12.081,07	0,1259

Lampiran 17 : Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Kediri Tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000

Komponen Retibusi daerah	Total Retribusi Daerah Dalam Ribuan (Rp 000)	Nilai Skalling
Uang Leges	62.936,75	1,57
Dispensasi Jalan /Jembatan	1.032.533,78	26
Uang Penambangan	51.723	1,29
Pemeriksaan pembantaian	59.028	1,47
Ijin Bangunan	2.283.857,624	57,50
Pengujian Kendaraan tidak bermotor	2.134	0,04
Stasiun, Bis dan taksi	441.821,2	11,112
Pukesmas dan balai	1.268.524,353	31,93
Pengobatan		
Tempat rekreasi dan olah raga	138.965	3,48
Pasar	3.971.590,215	100
Kartu ternak	160.857,25	4,04
Penerimaan timbangternak	80.493,325	2,013
Rumah Bola	2.090	0,00038
Pemberian ijin tempat usaha	68.528	1,71
Sewa ambulan /Kereta jenazah	1.974,56	0,0357
Uang jasa 10%dari karcis titipan sepeda	13.389,49	0,323
Penggilingan padi/Hulller	48.093,5	1,2
Pengiriman ternak keluar daerah	21.205,5	0,52
Pemberian ijin usaha angkutan	56.704	1,41
Pemberian ijin perusahaan bengkel kendaraan bermotor umum	555	0
Pemakaian kekayaan daerah	1.206.037,908	30,36
Gambar Bestek dan lain – lain INPRES	87.201	2,18
Pendaftaran penduduk KTP/KK	1.386.840,115	34,909
Retribusi IPAIR	62.967,568	1,57
Retribusi Parkir	350.611,253	8,81
Retribusi kebersihan	1.886.615,779	47,495

Lampiran 18 : Hasil Perhitungan Skalling Total penerimaan Laba BUMD Kabupaten Kediri Tahun anggaran 1995/19996- 1999/2000

KomponenPenerimaan	Total Penerimaan dalam Ribuan (Rp. 000)	Nilai Skalling
Bank Pembangunan daerah (Bank Jatim)	33.928,497	0
Laba Perusahaan Daerah Canda Bhirawa	86.495,62	12,64
Pendapatan Laba Bank Pasar	214.606,544	43,45
Pendapatan Laba PD Perkebunan Margo Mulyo	449.727,95	100



Lampiran 19 :Hasil Perhitungan Skalling Total penerimaan Dinas- Dinas
Kabupaten Kediri Tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Komponen Penerimaan	Total penerimaan dalam Ribuan (Rp. 000)	Nilai Skalling
Rumah Sakit Umum Daerah Pare	15.387.264,61	100
Dinas Perikanan Daerah	13.968,4	0
Dinas Peternakan Daerah	224.456,7	1,37
Dinas Pertanian Tanaman Pangan daerah	48.295,7	0,22
Dinas Perkebunan	14.275	0,002



Lampiran 20 : Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Lain –Lain
Kabupaten Kediri Tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000

Komponen Penerimaan Lain – lain	Total Penerimaan dalam Ribuan (Rp.000)	Nilai Skalling
Penerimaan lain – lain	84.458,451	11,48
Penerimaan Jasa Giro dari bank Pembangunan Daerah	682.517,746	100
Hasil dari Penjualan rupa- rupa barang milik daerah	86.092,5	11,72
Deviden dari hasil saham bank pembangunan Daerah	48.729,719	6,19
Penerimaan ganti rugi kendaraan yang dihapus	6.900	0

Lampiran 21 : Hasil Perhitungan Skalling Total Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Komponen Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	Total Penerimaan Dalam ribuan	Nilai Skalling
Pajak Bumi dan Bangunan	44514476,010	100
Pembagian Pajak Kendaraan Bermotor	4591130,710	10,27254
Iuran Hasil Hutan	179560,192	0,357559
Pembagian Air Bawah Tanah	1756053,981	3,900718
Hak Atas Tanah	83895,334	0,142553
Pembagian Pendaftaran tv	20468,000	0
Pembagian Pengambilan Pasir, Batu, dan Kerikil	220460,411	0,449482
Rehabilitasi cengkeh	38801,400	0,041204
Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	443678,558	0,951163
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3140204,073	7,011587

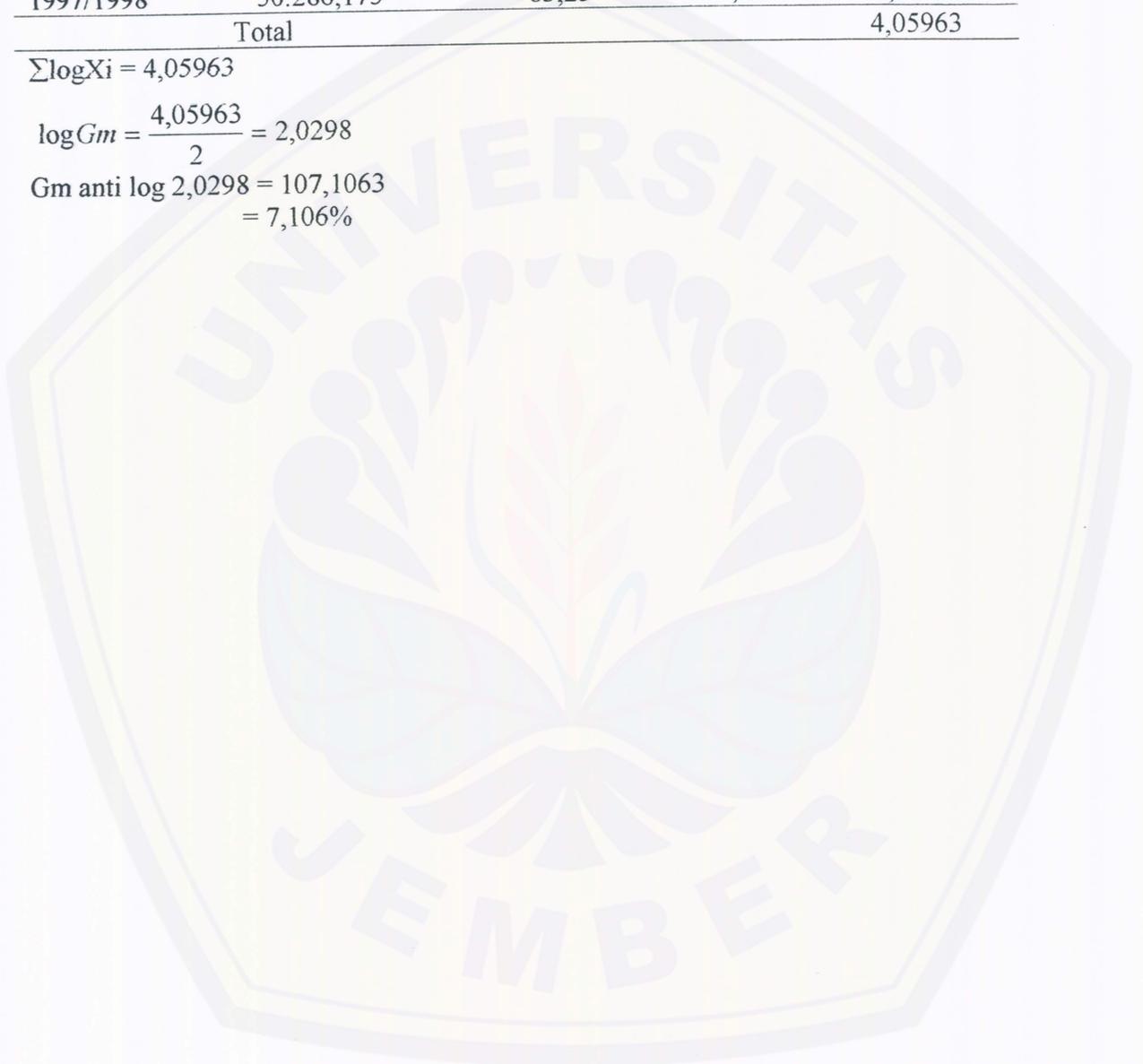
Lampiran 22: Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata/tahun
Pajak Pembangunan I di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –
1999/2000

Tahun	Pajak Pembangunan I (ribuan)	di	Xi	log Xi
1995/1996	43. 834,25			
1996/1997	50.369,425	6.535,175	114,9	2,06035
1997/1998	50.286,175	-83,25	99,83	1,99928
Total				4,05963

$$\Sigma \log Xi = 4,05963$$

$$\log Gm = \frac{4,05963}{2} = 2,0298$$

$$Gm \text{ anti log } 2,0298 = 107,1063 \\ = 7,106\%$$



Lampiran 23: Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata/Tahun Pajak Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Pajak Penerangan Jalan Umum(ribuan)	di	Xi	log Xi
1995/1996	953.649,335			
1996/1997	1.649.775,043	696.125,708	172,996	2,238
1997/1998	1.797.090,062	147.315,019	108,929	2,037
1998/1999	1.981.623,126	184.533,064	110,268	2,042
1999/2000	2.332.761,872	351.138,746	117,720	2,071
Total				8,388

$$\sum \log X_i = 8,338$$

$$\log G_m = \frac{8,338}{4} = 2,097$$

$$G_m \text{ anti log } 2,097 = 125,0259 \\ = 25,06\%$$

Lampiran 24 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata- Rata/Tahun Pajak Reklame di Kabupaten Kediri Pada Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Pajak Reklame(ribuan)	Di	Xi	Log Xi
1995/1996	46.287,155			
1996/1997	50.900,145	4613,03	109,966	2,0412
1997/1998	55.963,3	5063,155	109,947	2,0411
1998/1999	54.259,17	-1704,13	99,968	1,9998
1999/2000	65.862,106	11602,936	100,213	2,0009
Total				8,073

$$\Sigma \log Xi = 8,073$$

$$\log Gm \frac{8,073}{4} = 2,02075$$

$$Gm \text{ anti Log } 2,02075 = 104,89$$

$$= 4,89\%$$

Lampiran 25 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata/Tahun Pajak Kendaraan Tidak Bermotor Di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Pajak kendaraan tidak bermotor (ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	107.111,7			
1996/1997	110.075,9	2964,2	102,77	2,012
1997/1998	119.154,9	9079	108,25	2,034
Total				4,04

$$\sum \log Xi = 4,04$$

$$\log Gm = \frac{4,04}{2} = 2,023$$

$$Gm \text{ anti Log } 2,023 = 105,4387 = 5,44\%$$

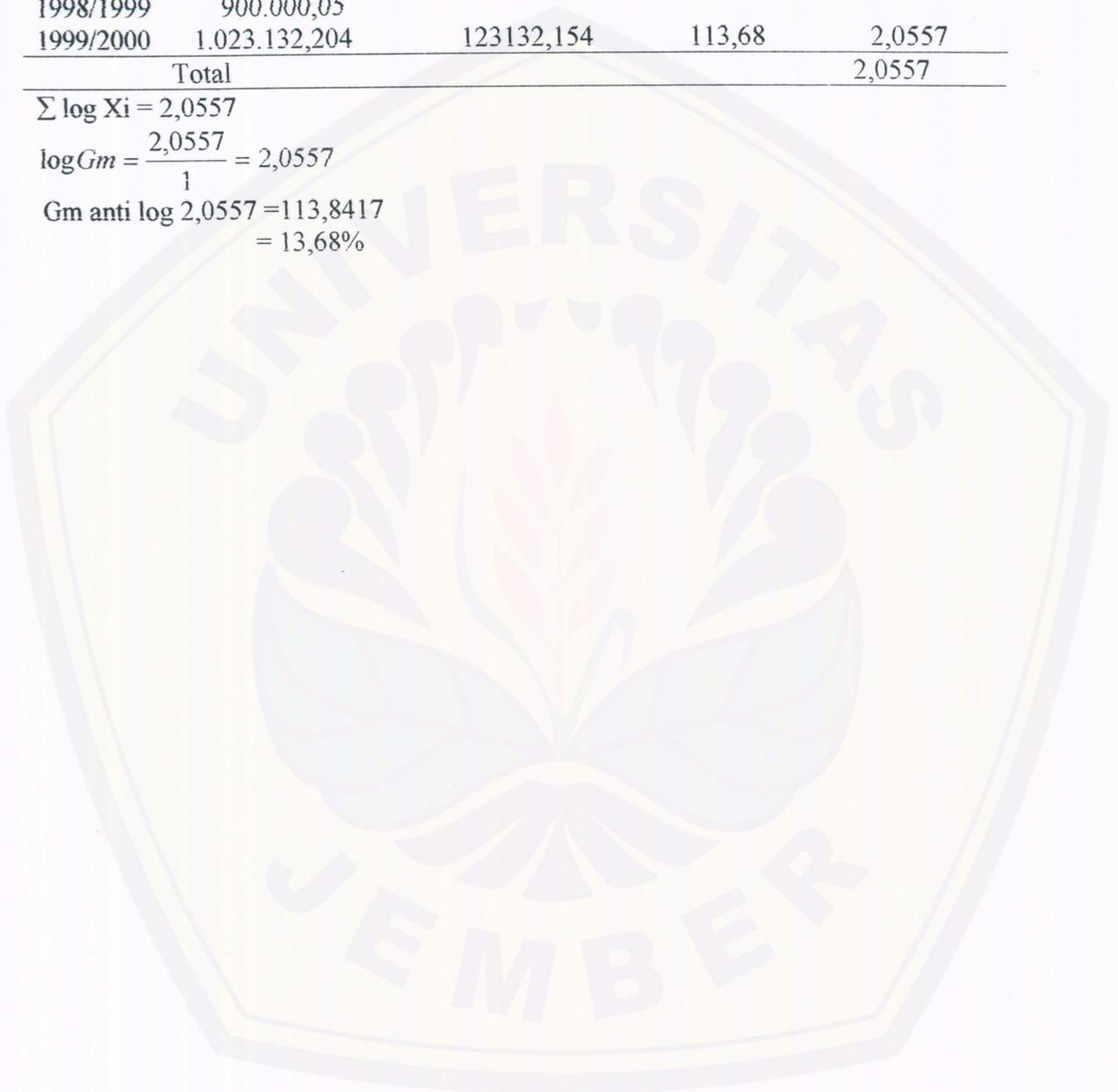
Lampiran 26 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata Pajak Pembayaran Iuran Bawah Tanah di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Pajak pembayaran iuran bawah tanah(ribuan)	di	Xi	log Xi
1998/1999	900.000,05			
1999/2000	1.023.132,204	123132,154	113,68	2,0557
Total				2,0557

$$\sum \log Xi = 2,0557$$

$$\log Gm = \frac{2,0557}{1} = 2,0557$$

$$Gm \text{ anti log } 2,0557 = 113,8417 \\ = 13,68\%$$



Lampiran 27 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata /Tahun Retribusi Pasar di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Retribusi Pasar (ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	641.092,078			
1996/1997	714.114,511	73.022,433	111,39	2,047
1997/1998	709.431,16	-4683,351	99,334	1,997
1998/1999	864.488,375	155.057,215	121,856	2,086
1999/2000	1.042.464,091	177975,716	120,587	2,081
Total				8,211

$$\sum \log Xi = 8,211$$

$$\log Gm = \frac{8,211}{4} = 2,05275$$

$$Gm \text{ anti log } 2,05275 = 112,915 \\ = 12,915\%$$

Lampiran 28 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata /Tahun Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Balai Pegobatan di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Retribusi Pasar (ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	234.151,796			
1996/1997	271.121,145	36.969,349	115,79	2,064
1997/1998	262.163,945	-8.957,2	96,69	1,985
1998/1999	270.222,408	8.058,463	103,07	2,013
1999/2000	230.865,059	-39.357,349	85,44	1,932
Total				7,994

$$\Sigma \log Xi = 7,994$$

$$\log Gm = \frac{7,994}{4} = 1,9985$$

$$Gm \text{ anti log } 1,9985 = 99,65 \\ = 0,997\%$$

Lampiran 29 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata/Tahun Retribusi Kebersihan di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Retribusi Kebersihan(ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	475.084,728			
1996/1997	491.845,73	16761,002	100,03528	2,000153
1997/1998	560.623,216	1.139,8	100,000	2,0000
1998/1999	194.855,79	-365767,426	99,347	1,99715
1999/2000	164.201,315	-30654,475	99,842	1,99932
Total				7,996619

$$\sum \log Xi \ 7,996619$$

$$\log Gm = \frac{7,996619}{4} = 1,99915$$

$$Gm \text{ anti log } 1,99915 = 1955283 \\ = 0.195\%$$

Lampiran30 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata- Rata Tahun Retribusi Ijin Bangunan Di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000

Tahun	Retribusi Ijin Bangunan	di	Xi	Log Xi
1995/996	190317.122			
1996/1997	1688071.425	1497754.303	107.8697822	2.032899802
1997/1998	190317.122	-1497754.303	99.11274234	1.996129493
1998/1999	90060.285	-100256.837	99.47321168	1.99770614
1999/200	125091.67	35031.385	100.3889771	2.001686029
		Total		8.028421464

$$\Sigma \log Xi = 8,0284$$

$$\log Gm = \frac{8,0284}{4} = 2,007$$

$$Gm \text{ anti } \log 2,007 = 101,625 = 1,625\%$$

Lampiran 31 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata – Rata/Tahun Retribusi
KTP/KK/Catatan Sipil di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran
1995/1996 – 1999/2000 (ribuan)

Tahun	Retribusi pendaftaran KTP/KK(ribuan)	di	Xi	log Xi
1995/1996	494.074,005			
1996/1997	237.256,525	-256.817,48	48,02	1,681
1997/1998	538.654,625	301.398,1	227,035	2,356
1998/1999	53.288	-485.366,625	9,893	0,995
1999/2000	63.567	10.279	119,289	2,007
	Total			7,109

$$\Sigma \log Xi = 7,109$$

$$\log Gm = \frac{7,109}{4} = 1,77725$$

$$Gm \text{ anti Log } 1,77725 = 59,8756$$

$$= 0,59888\%$$

Lampiran 32 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata /Tahun Dinas Rumah Sakit Daerah Pare di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

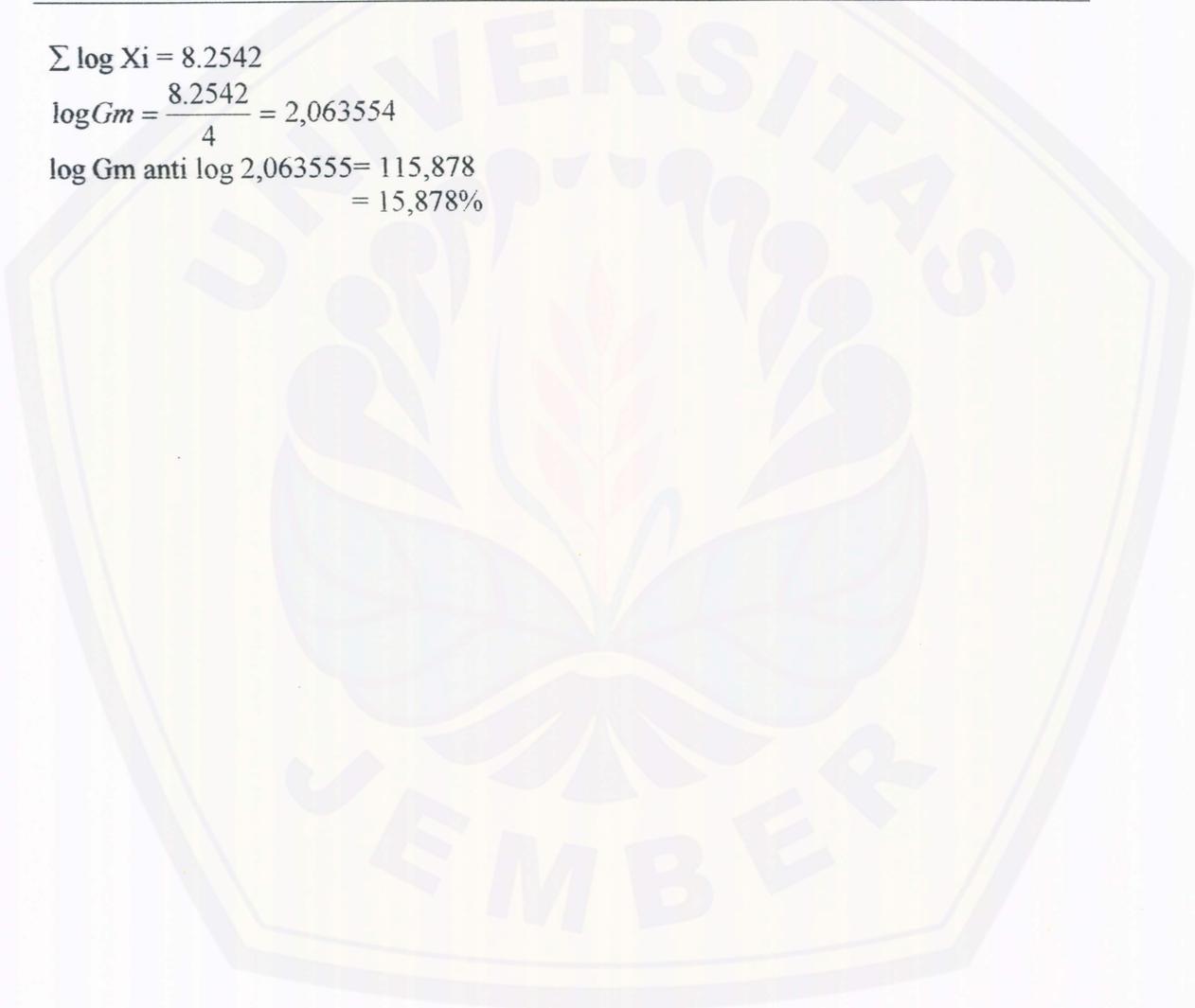
Tahun	RSUD Pare (ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	1.857.333,617			
1996/1997	2.375.606,139	518.272,524	127,904	2,1069
1997/1998	3.507.810,191	1.132.204,052	147,659	2,1693
1998/1999	4.311.941,775	804.131,584	122,924	2,0896
1999/2000	3.334.572	-977369,775	77,333	1,8884
Total				8.2542

$$\Sigma \log Xi = 8.2542$$

$$\log Gm = \frac{8.2542}{4} = 2,063554$$

$$\log Gm \text{ anti log } 2,063555 = 115,878$$

$$= 15,878\%$$



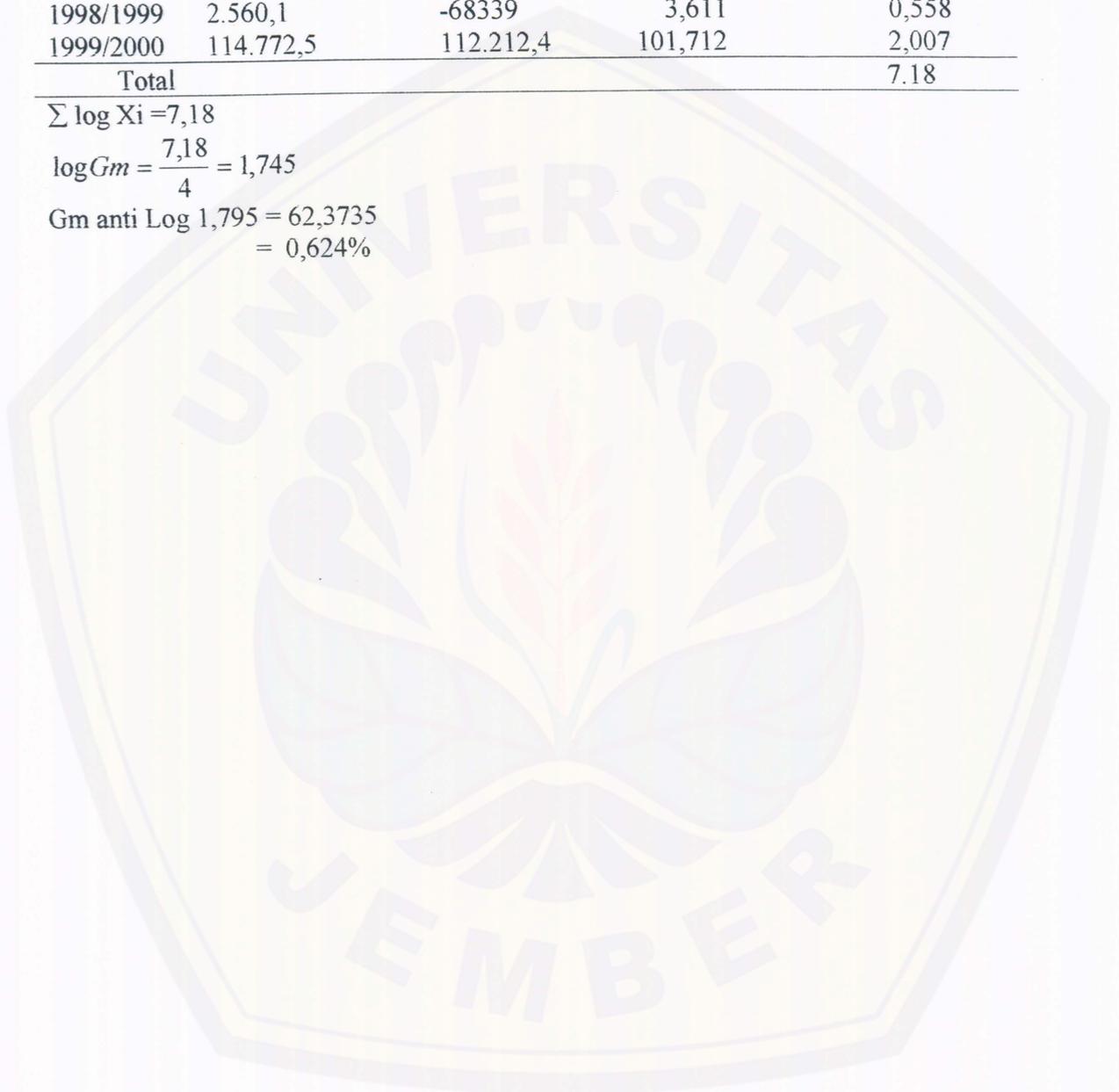
Lampiran 33: Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun Dinas Peternakan Di Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Dinas Peternakan	di	Xi	log Xi
1995/1996	17.222			
1996/1997	19.003	1781	110,341	2,043
1997/1998	70.899,1	51896,1	373,094	2,572
1998/1999	2.560,1	-68339	3,611	0,558
1999/2000	114.772,5	112.212,4	101,712	2,007
Total				7.18

$$\sum \log X_i = 7,18$$

$$\log G_m = \frac{7,18}{4} = 1,745$$

$$G_m \text{ anti Log } 1,795 = 62,3735 \\ = 0,624\%$$



Lampiran 34 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan rata-rata/tahun Laba Bank Pasar di Kabupaten Kediri selama tahun anggaran 1995/1996 –1999/2000

Tahun	Laba Bank Pasar (ribuan)	di	Xi	Log Xi
1995/1996	43.837,894			
1996/1997	45.479.454	1.641,561	10374	2,02
1997/1998	45.628,706	149,215	100,33	2,001
1998/1999	37.210.335	-8.418,371	81,55	1,91
1999/2000	42.450,154	5.239,82	114,08	2,06
Total				7,991

$$\sum \log Xi = 7,991$$

$$\text{LogGm} = \frac{7,991}{4} = 1,998$$

$$\text{Gm anti Log } 1,998 = 99,48 \\ = 0,995\%$$

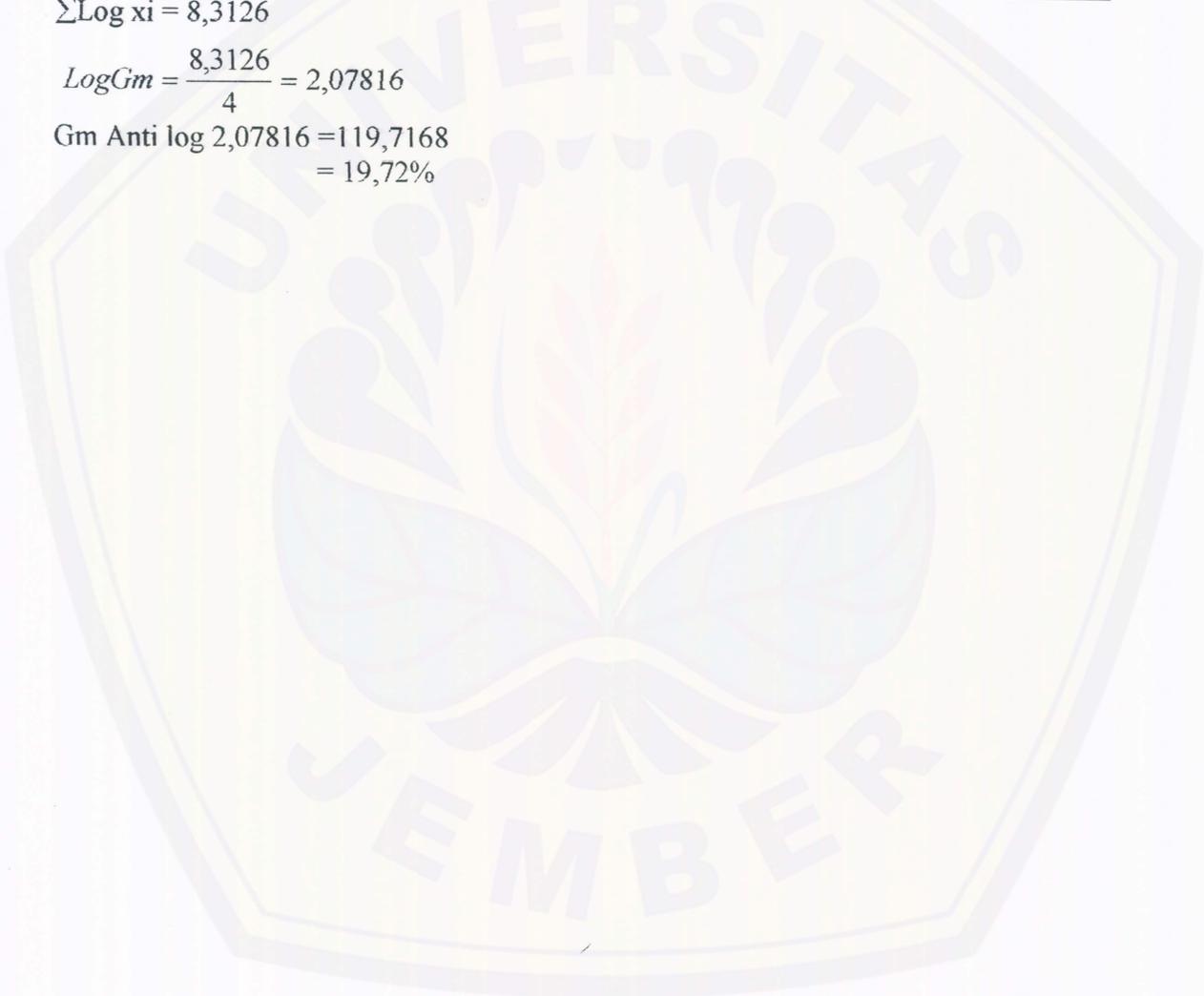
Lampiran35 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata /Tahun Laba PD Perkebunan Margomulyo Selama Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000

Tahun	Labanya	di	Xi	Log Xi
1995/1996	50.000			
1996/1997	45.280,250	-14.719,75	70,5605	1,8486
1997/1998	60.249,7	24.869,45	170,4911	2,2317
1998/1999	201.608	141.458,3	355,1771	2,5253
1999/2000	102.690	-98.918	50.9355	1,707
Total				8.3126

$$\sum \text{Log xi} = 8,3126$$

$$\text{Log Gm} = \frac{8,3126}{4} = 2,07816$$

$$\text{Gm Anti log } 2,07816 = 119,7168 \\ = 19,72\%$$



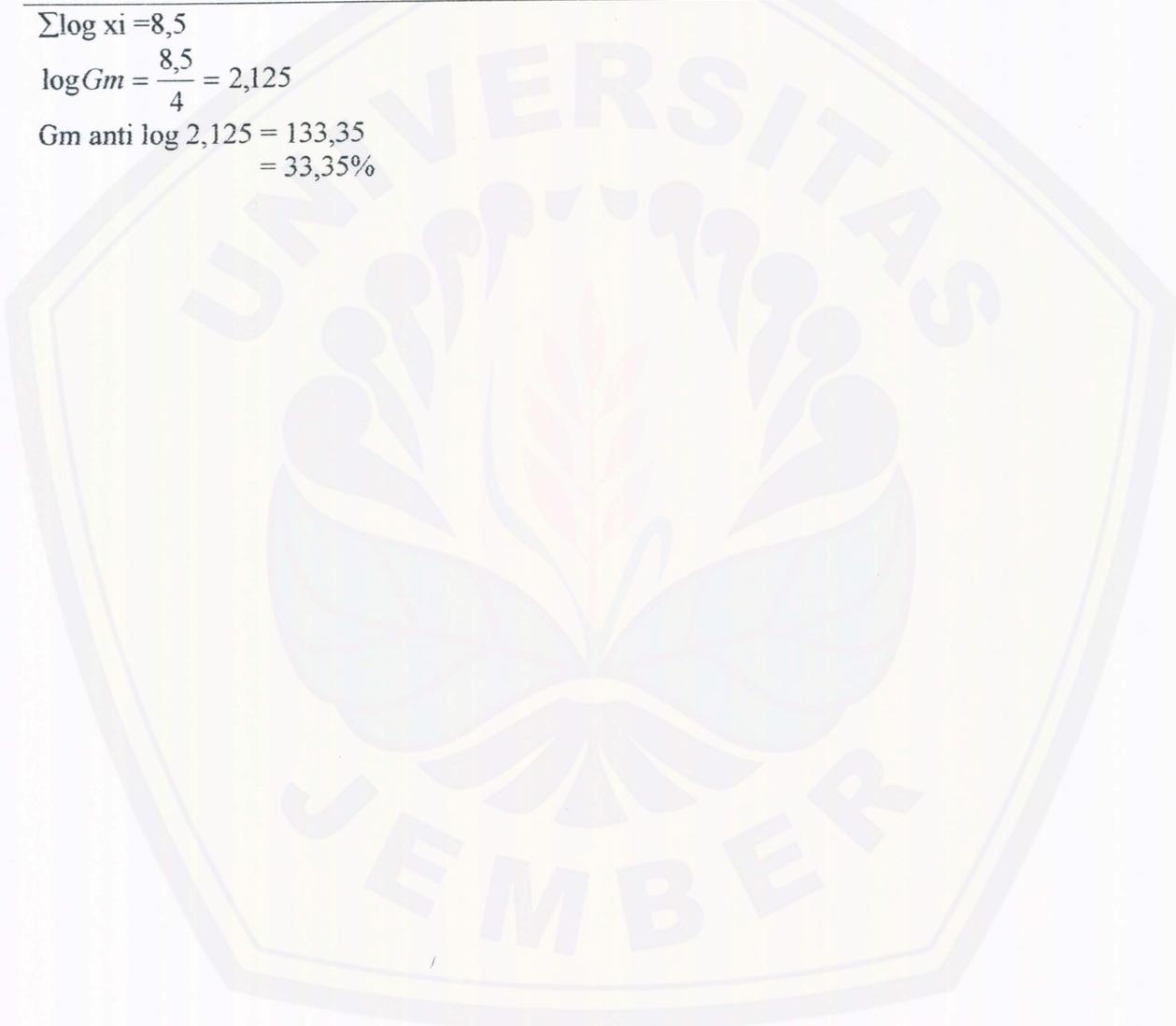
Lampiran 36 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata /tahun Hasil Penjualan Rupa-Rupa Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000

Tahun	Penjualan rupa – rupa(ribuan)	Xi	di	log Xi
1995/1996	15.400			
1996/1997	15.037,5	-362,5	97,65	1,99
1997/1998	26.467,5	11.430	176,01	2,25
1998/1999	7.825	-18.642	29,56	1,47
1999/2000	21.362,5	13.537,5	273	2,24
Total				8,5

$$\sum \log xi = 8,5$$

$$\log Gm = \frac{8,5}{4} = 2,125$$

$$Gm \text{ anti log } 2,125 = 133,35 \\ = 33,35\%$$



Lampiran 37 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata /Tahun Penerimaan Jasa Giro Dan Bank Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Penerimaan Jasa Giro dari Bank Pemb. Daerah (ribuan)	X_i	d_i	$\log X_i$
1995/1996	84.543,967			
1996/1997	119.673,388	35.093,421	141,51	2,15
1997/1998	142.316,111	22.678,723	118,96	2,07
1998/1999	152.292,561	9.976,45	107,01	2,03
1999/2000	682.517,746	530.225,185	448,16	2,65
Total				8,9

$$\sum \log X_i = 8,9$$

$$\log G_m = \frac{8,9}{4} = 2,25$$

$$G_m \text{ anti } \log 2,25 = 167,88 \\ = 67,88\%$$

Lampiran 38 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata /Tahun PBB di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/2000

Tahun	PBB(ribuan)	Xi	di	log Xi
1995/1996	5.111.343,969			
1996/1997	8.232.619,016	3.121.275,047	161,07	2,207
1997/1998	8.414.845,654	182.226,638	102,21	2,009
1998/1999	11.009.314,6	2.594.468,956	130,83	2,117
1999/2000	11.746.352,77	737.038,16	106,69	2,028
Total				8,361

$$\sum \log Xi = 8,361$$

$$\log Gm = \frac{8,361}{4} = 2,09025$$

$$Gm \text{ anti } \log 2,09025 = 123,098$$

$$= 23,098\%$$

Lampiran 39 : Hasil Perhitungan Pertumbuhan Rata –Rata /Tahun Pembagian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 1995/1996 –1999/200

Tahun	Pembagian Pajak Kendaraan Bermotor (ribuan)	X_i	d_i	$\log X_i$
1995/1996	1.265.172,25			
1996/1997	996.749,571	-298.422,679	76,41	1,883
1997/1998	1.144.090,386	1.773.408,815	118,34	2,073
1998/1999	1.215.118,503	737.038,16	106,21	2,026
Total				5,982

$$\sum \log X_i = 5,982$$

$$\log G_m = \frac{5,982}{3} = 1,994$$

$$G_m \text{ anti } \log 1,994 = 98,628 \\ = 0,987\%$$

Lampiran 40 : Data Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 – 1999/2000 dalam Data Kuartalan(ribuan)

Data input

HEADER DATA FOR: C:YULI
NUMBER OF CASES: 20

LABEL: PENGOLAHAN DATA
NUMBER OF VARIABLES: 3

	YDAERAH	YRUTIN	X1
1	12.560.249,67	12.249.940,38	-2.38
2	13.481.574,46	12.975.172,13	-2.13
3	14.027.899,25	13.700.403,88	-1.88
4	14.574.224,04	14.425.635,63	-1.63
5	17.323.792,13	15.179.103,63	-1.38
6	18.751.415,36	15.915.629,88	-1.13
7	20.179.037,79	16.652.156,13	-0.88
8	21.606.660,22	17.388.682,38	-0.63
9	19.102.910,25	18.741.736,13	-0.38
10	18.957.983,72	19.724.873,38	-0.13
11	18.813.057,20	20.708.010,63	0.13
12	18.668.130,67	21.691.147,88	0.38
13	21.393.340,47	54.887.445,13	0,63
14	22.396.468,48	68.755.846,38	0.88
15	23.399.596,48	82.624.247,63	1.13
16	24.402.742,49	96.492.648,88	1.38
17	23.700.548,61	99.069.405,75	1.63
18	24.021.680,06	108.421.149,30	1.88
19	24.663.567,96	117.772.892,80	2.13
20	28.342.561,51	127.124.636,30	2.38

Lampiran 41: Hasil Analisis regresi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

Analisis regresi

----- REGRESSION ANALYSIS -----

HEADER DATA FOR: C:YULI
NUMBER OF CASES: 20

LABEL: PENGOLAHAN DATA
NUMBER OF VARIABLES: 3

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	.0000	1.4835
DEP. VAR.:	YDAERAH	20018371.1810	4225154.2629

DEPENDENT VARIABLE: YDAERAH

VAR.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 18)	PROB.
X1	2589397.0296	279584.3274	9.262	.00000
CONSTANT	20018371.1810			

STD. ERROR OF EST. = 1807875.3648

r SQUARED = .8266
r = .9091

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	2.80355E+14	1	2.80355E+14	85.777	2.869E-08
RESIDUAL	58831440024210.0000	18	3.26841E+12		
TOTAL	3.39187E+14	19			

Trend Pendapatan Daerah : $Y_{daerah} = 20.018.371,1810X + 2.589.397,0296 X_1$

Lampiran 42 : Hasil Analisis Regresi Pengeluaran Daerah Kabupaten Kediri

----- REGRESSION ANALYSIS -----

HEADER DATA FOR: C:YULI LABEL: PENGOLAHAN DATA
 NUMBER OF CASES: 20 NUMBER OF VARIABLES: 3

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	.0000	1.4835
DEP. VAR.: YRUTIN		47725038.2115	41891005.4984

DEPENDENT VARIABLE: YRUTIN

VAR.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 18)	PROB.
X1	24784438.9936	3189788.8967	7.770	.00000
CONSTANT	47725038.2115			

STD. ERROR OF EST. = 20626123.1397

r SQUARED = .7703
 r = .8777

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	2.56844E+16	1	2.56844E+16	60.372	3.704E-07
RESIDUAL	7.65787E+15	18	4.25437E+14		
TOTAL	3.33423E+16	19			

Trend Pengeluaran Rutin : $Y_{rutin} = 47.725.038,2115 X + 24.784.438,9936 X_1$

Lampiran 43 : Hasil Perhitungan Ternd Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996-2004/2005 dalam Data Kwartalan(ribuan)

NO	a	b	x	bx	y'
1	20018371,181	2589397,0296	-2,38	-6162764,9304	13855606,2506
2	20018371,181	2589397,0296	-2,13	-5515415,6730	14502955,5080
3	20018371,181	2589397,0296	-1,88	-4868066,4156	15150304,7654
4	20018371,181	2589397,0296	-1,63	-4220717,1582	15797654,0228
5	20018371,181	2589397,0296	-1,38	-3573367,9008	16445003,2802
6	20018371,181	2589397,0296	-1,13	-2926018,6434	17092352,5376
7	20018371,181	2589397,0296	-0,88	-2278669,3860	17739701,7950
8	20018371,181	2589397,0296	-0,63	-1631320,1286	18387051,0524
9	20018371,181	2589397,0296	-0,38	-983970,8712	19034400,3098
10	20018371,181	2589397,0296	-0,13	-336621,6138	19681749,5672
11	20018371,181	2589397,0296	0,13	336621,6138	20354992,7948
12	20018371,181	2589397,0296	0,38	983970,8712	21002342,0522
13	20018371,181	2589397,0296	0,63	1631320,1286	21649691,3096
14	20018371,181	2589397,0296	0,88	2278669,3860	22297040,5670
15	20018371,181	2589397,0296	1,13	2926018,6434	22944389,8244
16	20018371,181	2589397,0296	1,38	3573367,9008	23591739,0818
17	20018371,181	2589397,0296	1,63	4220717,1582	24239088,3392
18	20018371,181	2589397,0296	1,88	4868066,4156	24886437,5966
19	20018371,181	2589397,0296	2,13	5515415,6730	25533786,8540
20	20018371,181	2589397,0296	2,38	6162764,9304	26181136,1114
21	20018371,181	2589397,0296	2,63	6810114,1878	26828485,3688
22	20018371,181	2589397,0296	2,88	7457463,4452	27475834,6262
23	20018371,181	2589397,0296	3,13	8104812,7026	28123183,8836
24	20018371,181	2589397,0296	3,38	8752161,9600	28770533,1410
25	20018371,181	2589397,0296	3,63	9399511,2174	29417882,3984
26	20018371,181	2589397,0296	3,88	10046860,4748	30065231,6558
27	20018371,181	2589397,0296	4,13	10694209,7322	30712580,9132
28	20018371,181	2589397,0296	4,38	11341558,9896	31359930,1706
29	20018371,181	2589397,0296	4,63	11988908,2470	32007279,4280
30	20018371,181	2589397,0296	4,88	12636257,5044	32654628,6854
31	20018371,181	2589397,0296	5,13	13283606,7618	33301977,9428
32	20018371,181	2589397,0296	5,38	13930956,0192	33949327,2002
33	20018371,181	2589397,0296	5,63	14578305,2766	34596676,4576
34	20018371,181	2589397,0296	5,88	15225654,5340	35244025,7150
35	20018371,181	2589397,0296	6,13	15873003,7914	35891374,9724
36	20018371,181	2589397,0296	6,38	16520353,0488	36538724,2298
37	20018371,181	2589397,0296	6,63	17167702,3062	37186073,4872
38	20018371,181	2589397,0296	6,88	17815051,5636	37833422,7446
39	20018371,181	2589397,0296	7,13	18462400,8210	38480772,0020
40	20018371,181	2589397,0296	7,38	19109750,0784	39128121,2594

Lampiran 44 : Hasil Perhitungan Trend Pengeluaran rutin daerah Kabupaten Kediri Selama Tahun Anggaran 1995/1996- 2004/2005 dalam Bentuk Data Kwartalan(ribuan)

NO	a	b	x	bx	Y'
1	47725038,2115	24784438,9936	-2,38	-58986964,80	-11261926,5933
2	47725038,2115	24784438,9936	-2,13	-52790855,06	-5065816,8449
3	47725038,2115	24784438,9936	-1,88	-46594745,31	1130292,9035
4	47725038,2115	24784438,9936	-1,63	-40398635,56	7326402,6519
5	47725038,2115	24784438,9936	-1,38	-34202525,81	13522512,4003
6	47725038,2115	24784438,9936	-1,13	-28006416,06	19718622,1487
7	47725038,2115	24784438,9936	-0,88	-21810306,31	25914731,8971
8	47725038,2115	24784438,9936	-0,63	-15614196,57	32110841,6455
9	47725038,2115	24784438,9936	-0,38	-9418086,82	38306951,3939
10	47725038,2115	24784438,9936	-0,13	-3221977,07	44503061,1423
11	47725038,2115	24784438,9936	0,13	3221977,07	50947015,2807
12	47725038,2115	24784438,9936	0,38	9418086,82	57143125,0291
13	47725038,2115	24784438,9936	0,63	15614196,57	63339234,7775
14	47725038,2115	24784438,9936	0,88	21810306,31	69535344,5259
15	47725038,2115	24784438,9936	1,13	28006416,06	75731454,2743
16	47725038,2115	24784438,9936	1,38	34202525,81	81927564,0227
17	47725038,2115	24784438,9936	1,63	40398635,56	88123673,7711
18	47725038,2115	24784438,9936	1,88	46594745,31	94319783,5195
19	47725038,2115	24784438,9936	2,13	52790855,06	100515893,2679
20	47725038,2115	24784438,9936	2,38	58986964,80	106712003,0163
21	47725038,2115	24784438,9936	2,63	65183074,55	112908112,7647
22	47725038,2115	24784438,9936	2,88	71379184,30	119104222,5131
23	47725038,2115	24784438,9936	3,13	77575294,05	125300332,2615
24	47725038,2115	24784438,9936	3,38	83771403,80	131496442,0099
25	47725038,2115	24784438,9936	3,63	89967513,55	137692551,7583
26	47725038,2115	24784438,9936	3,88	96163623,30	143888661,5067
27	47725038,2115	24784438,9936	4,13	102359733,04	150084771,2551
28	47725038,2115	24784438,9936	4,38	108555842,79	156280881,0035
29	47725038,2115	24784438,9936	4,63	114751952,54	162476990,7519
30	47725038,2115	24784438,9936	4,88	120948062,29	168673100,5003
31	47725038,2115	24784438,9936	5,13	127144172,04	174869210,2487
32	47725038,2115	24784438,9936	5,38	133340281,79	181065319,9971
33	47725038,2115	24784438,9936	5,63	139536391,53	187261429,7455
34	47725038,2115	24784438,9936	5,88	145732501,28	193457539,4939
35	47725038,2115	24784438,9936	6,13	151928611,03	199653649,2423
36	47725038,2115	24784438,9936	6,38	158124720,78	205849758,9907
37	47725038,2115	24784438,9936	6,63	164320830,53	212045868,7391
38	47725038,2115	24784438,9936	6,88	170516940,28	218241978,4875
39	47725038,2115	24784438,9936	7,13	176713050,02	224438088,2359
40	47725038,2115	24784438,9936	7,38	182909159,77	230634197,9843

